PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2013 - 2018

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

2017

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur bagi Allah SWT yang maha sempurna. Tiada ilmu dan kekuatan kecuali mutlak milikNya sehingga atas berkah dan rahmat serta curahan ilmu dariNya, Perubahan Rencana Strategis Pembangunan Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dapat diselesaikan.

Rencana Stategis Pembangunan Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 dan ketentuan-ketentuan yang terkait. Fungsi Rencana Strategis ini pada dasarnya adalah untuk memberikan haluan dan arahan dengan merinci langkah-langkah dan kegiatan yang akan ditempuh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk mencapai misinya. Namun Rencana Strategis ini bukanlah alat yang baku, sehingga terbuka untuk disesuaikan apabila terjadi hal-hal penting yang bersifat internal maupun eksternal.

Sebagai haluan dan acuan rencana strategis ini memuat pokok-pokok pikiran yang bersumber dari sejumlah isu strategis yang membantu menetapkan program dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dan disusun menurut skala prioritas serta mendukung kepada visi dan misi yang akan dicapai.

Demikian Perubahan Rencana Stategis Pembangunan Ketahanan Pangan dan Peternakan ini disusun untuk dipedomani, semoga bermanfaat dan selamat bekerja.

Medan

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Ir. DAHLER, M.MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196103231987031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN I-1
- 1.1 Latar Belakang..... I-1
- 1.2 Landasan Hukum..... I-3
- 1.3 Maksud dan Tujuan I-4
- 1.4 Sistematika Penulisan..... I-4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... II-1
- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... II-1
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... II-3
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-4
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PerangkatVDaerah..... II-13

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGI... III-1
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah III-1
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih III-6
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota III-11
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... III-12
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis III-13

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... IV-1
- 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah IV-1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... V-1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... VI-1

BAB VII INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD..... VII-1

BAB VIII PENUTUP..... VIII-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar belakang perlunya dilakukan perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, yang substansinya membahas mengenai perubahan kewenangan urusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi dan dari Provinsi ke Pusat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan kewenangan ini pada prinsipnya diperlukan kesiapan secara keseluruhan baik pada aspek Kelembagaan, Regulasi, Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana beserta perangkat pendukungnya sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki kesiapan sejak awal juga dipandang perlu dalam pelaksanaan perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 adalah dengan telah terbit dan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana regulasi tersebut akan membawa perubahan mendasar terhadap tata laksana pemerintahan di daerah seperti klasifikasi urusan pemerintahan yang terbagi atas pembagian urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum yang berdampak terhadap kewenangan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan sehingga akan berdampak pula kepada keberadaan perangkat daerah yang ada, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Kedua, dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 maka sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunaan Nasional beserta peraturan perundangan turunannya mengamanatkan bahwa pelaksanaan program-program pembangunan daerah harus berpedoman pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional. Sehingga perlu melakukan perubahan dan pengkajian kembali muatan dan substansi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, untuk dapat lebih diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun berikutnya dengan melakukan pula harmonisasi terhadap program-program pembangunan Provinsi Sumatera Utara dengan Program-Program Pembangunan Nasional dalam pencapaian Nawa Cita sebagai tujuan Jangka Menengah Nasional. Dengan penyelarasan tersebut diharapkan mampu menghasilkan sinergi program yang dapat berdampak luas terhadap pencapaian tujuan yang diharapkan.

Ketiga, dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 yang menyatakan "Segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah", yang telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Keempat, dikeluarkannnya Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2015-2019 yang menyatakan bahwa:

a. Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi agar memberikan dukungan pencapaian tujuan pembangunan nasional tahun 2015-2019;
b. Penyelarasan pencapaian tujuan nasional menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial;
c. Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dan nasional dengan prinsip money follow program;
d. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN dilakukan dengan penyelarasan Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Prioritas Pembangunan, Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah; serta penyelarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional di Daerah;
e. Bagi daerah yang melakukan Pemilukada Serentak Tahun 2017 dan daerah yang melakukan perubahan RPJMD agar melakukan penyelarasan dengan RPJMN 2015-2019 mengikuti petunjuk Surat Edaran Bersama ini.

Berdasarkan lima hal tersebut diatas, menjadi landasan pemikiran untuk dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, dengan maksud untuk memudahkan dalam pengukuran capaian kinerja sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga dapat dilakukan penilaian akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 282 yang menyatakan :

1) Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
   a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
   b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
   c. Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
   d. Merugikan kepentingan nasional
2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis

ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional

3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Dan Pasal 283 yang menyatakan bahwa RPJPD dan RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam rangka memenuhi amanat Permendagri tersebut maka Perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum perubahan Renstra adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Penyesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037.
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utaratahun 2013-2018.
13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organiasasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.
14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara adalah (1) untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan program strategis dengan skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, (2) sebagai pedoman bagi unit kerja dalam merumuskan kebijakan dan menjadi acuan bagi instansi terkait di kabupaten/kota dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan dan peternakan di Provinsi Sumatera Utara, (3) sebagai dasar bagi unit kerja dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program/kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara adalah menetapkan langkah yang akan diambil dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan dan peternakan yang telah ditetapkan dalam bentuk sasaran strategis, kebijakan dan program kegiatan sebagai tujuan pembangunan dapat diwujudkan sesuai visi dan misinya.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara, Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang diimplementasikan melalui dukungan dana yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Strategi yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 disusun secara sistematis kedalam naskah dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERNAGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Pernagkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra perangkat daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan perangkat daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Setelah penyajian setiap tabel diatas, dikemukakan apa saja interpretasi hasil evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah. Interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Hasil interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan perangkat daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra perangkat daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra perangkat daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

1.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

1.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

1.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan perangkat daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra perangkat daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah sebagaimana dihasilkan pada Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah perangkat daerah dan Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan perangkat

daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana dihasilkan dari perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Naskah rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini selanjutnya disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk diverifikasi.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi menjelaskan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu Dinas Daerah dalam kedudukannya pada organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi di bidang ketahanan pangan dan peternakan serta tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
d. Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan merupakan Tipe A yang terdiri dari 1 (satu) sekretariat dengan 3 (tiga) sub bagian, 4 (empat) bidang dengan masing-masing 3 (tiga) seksi dan 8 (delapan) unit pelaksana teknis (UPT) dengan 1 (satu) sub bagian dan 2 (dua) seksi serta didukung kelompok jabatan fungsional. Rincian struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas
   1) Sekretariat
      a) Sub Bagaian Umum dan Kepegawaian

b) Sub Bagian Keuangan
c) Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik

2) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
   a) Seksi Ketersediaan Pangan
   b) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan
   c) Seksi Kerawanan Pangan

3) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
   a) Seksi Konsumsi Pangan
   b) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
   c) Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan

4) Bidang Kesehatan Hewan
   a) Seksi Pengawasan Obat Hewan
   b) Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Hewan
   c) Seksi Investigasi Penyakit Hewan

5) Bidang Peternakan
   a) Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak
   b) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak
   c) Seksi Pakan Ternak

6) UPT Kompetensi Keamanan Pangan Daerah(OKKPD)
   a) Sub Bagian Tata Usaha
   b) Seksi Pengujian Mutu Pangan
   c) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan

7) UPT Balai Inseminasi Buatan (IB)
   a) Sub Bagian Tata Usaha
   b) Seksi Produksi
   c) Seksi Pengujian dan Distribusi

8) UPT Kesehatan Masyarakat Veteriner
   a) Sub Bagian Tata Usaha
   b) Seksi Hygiene dan Sanitasi
   c) Seksi Pangan dan Non Pangan

9) UPT Aneka Ternak dan Hewan Kesayangan
   a) Sub Bagian Tata Usaha
   b) Seksi Aneka Ternak
   c) Seksi Hewan Kesayangan

10) UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona
   a) Sub Bagian Tata Usaha
   b) Seksi Pengembangan dan Produksi
   c) Seksi Pengujian dan Distribusi

11) UPT Pembibitan Ternak Unggas dan Sapi Sihitang
   a) Sub Bagian Tata Usaha
   b) Seksi Pengembangan dan Produksi
   c) Seksi Pengujian dan Distribusi

12) UPT Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak
   a) Sub Bagian Administrasi
   b) Sub Bidang Mutu
   c) Sub Bidang Teknis

13) UPT Rumah Sakit Hewan
   a) Sub Bagian Tata Usaha
   b) Seksi Pelayanan Medik
   c) Seksi Penunjang Pelayanan Medik

14) Kelompok Jabatan Fungsional

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia

Jumlah seluruh pegawai pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 161 Orang. Dari jumlah tersebut terdapat pegawai negeri sipil sebanyak 130 orang dengan berbagai keahlian yang mendukung terlaksananya pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dengan baik (Tabel 2.1).

Tabel 2.1. Keadaan PNS pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	2	3
1	Jumlah Pegawai	222
2	Kualifikasi Menurut Pendidikan	
	SD	2
	SLTP	1
	SLTA	56
	D-3	13
	S-1	122
	S-2	28
3	Kualifikasi Menurut Golongan	
	Golongan I	1
	Golongan II	38
	Golongan III	152
	Golongan IV	31
4	Kualifikasi Menurut Jabatan	
	Eselon II	1
	Eselon III	7
	Eselon IV	27

Sumberdaya Asset atau Modal

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara memiliki asset yang mencakup tanah, bangunan, ternak, kendaraan, dan alat perkantoran.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

A. Ketahanan Pangan

Pembangunan Ketahanan Pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Upaya pembangunan ketahanan pangan dilakukan secara bertahap melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuan , mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah serta mampu untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Pembangunan Ketahanan Pangan pada hakekatnya adalah pemberdayaan masyarakat, yang berarti meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu. Terwujudnya Ketahanan Pangan ditentukan oleh 3(tiga) pilar; yaitu (1) Ketersediaan Pangan; (2) Aksesibilitas pangan (distribusi, akses pangan rumah tangga dan mata pencaharian); dan (3) Pemanfaatan pangan (konsumsi, gizi dan kesehatan)

Secara umum, situasi ketahanan pangan Sumatera Utara tahun 2008 -2012 cenderung semakin membaik dan kondusif. Kondisi ketahanan pangan yang semakin baik ditunjukkan oleh beberapa indikator/pencapaian kinerja urusan ketahanan pangan yang dicapai sebagai berikut :

a. Beberapa produksi komoditas pangan penting mengalami pertumbuhan positip dari tahun 2008 hingga 2012
b. Fluktuasi harga-harga pangan lebih stabil, baik secara umum maupun pada saat menjelang hari-hari besar nasional pada saat puasa. Idul fitri, natal dan tahun baru.
c. Nilai tukar petani (NTP) yang mencapai diatas seratus
d. Peran serta masyarakat dan pemerintah daerah meningkat, yang ditunjukkan oleh semakin beragamnya kreativitas pemerintah daerah dalam menangani ketahanan pangan.
e. Proporsi penduduk miskin dan rawan pangan semakin menurun.

Peranserta Badan Ketahanan Pangan dalam mendorong pemantapan ketahanan pangan tersebut dilakukan melalui pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan dan langkah-langkah implementasi pemantapan ketahanan pangan masyarakat dengan kegiatan Program aksi Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (GEMA PANGAN), Penanganan daerah rawan pangan, Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat, Penguatan lembaga ekonomi pedesaan (LUEP), Percepatan diversifikasi konsumsi pangan, Penanganan mutu dan keamanan pangan serta Penguatan kelembagaan dan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.

Namun demikian, disamping keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai dalam mewujudkan ketahanan pangan wilayah, Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang masih harus diwaspadai untuk mewujudkan ketahanan pangan dan mencapai salah satu target MDGs, yaitu mengurangi kemiskinan dan kerawanan pangan setengahnya pada tahun 2015, atau paling tidak mempertahankan kinerja ketahanan pangan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

Gambaran Pertanian

Jumlah Penduduk Sumatera Utara Tahun 2012 sebesar 13.215.401 jiwa atau 3.131.600 KK , jumlah Rumah Tangga yang bekerja di sector pertanian yaitu sebanyak 1.435.443 KK (45,83 %) yang terdiri dari jumlah Rumah Tangga Pertanian Tanaman Pangan sebanyak 1.262.421 KK dan di Sektor Perikanan sebesar 173.022 KK. Berdasarkan angka tersebut dapat dikatakan bahwa hampir limapuluh persen penduduk Sumatera Utara bekerja di sector pertanian.

Potensi lahan Pertanian di Provinsi Sumatera Utara terbesar adalah lahan pertanian bukan sawah sebesar 1.123.921 Ha atau sebesar 70,74% dari total potensi lahan pertanian. Potensi lahan sawah (irigasi dan non irigasi) sebesar 464.827 Ha, bila dibandingkan dengan potensi lahan pertanian tahun 2011 yaitu sebesar 1.746.845 Ha, terjadi penurunan potensi lahan pertanian sebesar 158.097 Ha.

Nilai Tukar Petani (NTP) selama tahun 2010 s/d 2012 berfluktuasi tetapi masih tetap diatas seratus. NTP subsektor tanaman pangan terus bertambah dari 98,47 tahun 2010 menjadi 100,29 tahun 2012. Perkembangan sector pertanian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 1. Perkembangan Sektor Pertanian di Sumatera Utara Tahun 2010 – 2012

No.	Uraian	2010	2011	2012
1.	PDRB Sektor pertanian	22,92	22,48	21,88
2.	Nilai Tukar Petani (NTP) sektor pertanian	102,36	103,42	101,71
	NTP Tanaman Pangan	98,47	99,52	100,29
	NTP Hortikultura	109,69	111,98	108,70
	NTP Tanaman Perkebunan	101,67	106,49	100,15
	NTP Peternakan	100,42	104,34	105,13
	NTP Perikanan	102,34	99,19	99,15
3.	Pertumbuhan sektor pertanian	5,08	5,61	5,29

Sumber: Dinas Pertanian PSU dan BPS PSU

Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama yang berasal dari produksi selama lima tahun terakhir secara rata-rata mengalami kenaikan kecuali kedele, sementara kebutuhan beras untuk dikonsumsi terus bertambah sejalan dengan pertambahan penduduk. Kebutuhan beras konsumsi masih dapat diatasi dari produksi wilayah, hal ini dapat terlihat dari data ketersediaan beras untuk konsumsi juga mengalami kenaikan, secara jelas tertera pada table berikut.

Tabel.2.Ketersediaan Pangan Utama (Beras, Jagung , Kedele, Daging Sapi)

No.	URAIAN	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012*)
1.	Padi					
	Produksi GKG (ton)	3.340.796	3.527.899	3.582.302	3.607.405	3.715.514
	Kebutuhan Konsums berasi/ Kapita/Tahun (Kg)	139,00	139,50	136,85	134,80	132,60
	Kebutuhan Konsumsi per Tahun (Ton)	1.796.706,08	1.826.429,98	1.814.553,41	1.809.848,79	1.802.421,59
	Ketersediaan Beras untuk dikonsumsi*) (Ton)	1.920.674,61	1.998.043,24	2.028.854,65	2.043.070,73	2.089.521,46
2.	Jagung					
	Produksi	1.096.969	1.166.548	1.377.718	1.294.645	1.369.089
	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	61,125	61,247	61,370	61,492	61,615
	Kebutuhan (Konsumsi+Industri) per Tahun (Ton)	790.098	801.887	813.731	829.417	873.503
3.	Kedele					
	Produksi (ton)	11.648	14.206	9.438	11.425	5.923
	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/ Tahun (Kg)	4,620	4,438	4,443	4,447	4,452
	Kebutuhan (Konsumsi+Industri) per Tahun (Ton)	59.717,86	59.717,86	59.717,86	59.717,86	59.717,86
4.	Daging Sapi					
	Kebutuhan Konsumsi/Kapita/ Tahun (Kg)	8,95	9,47	9,85	9,99	10,28
	Kebutuhan Konsumsi per-tahun (Ton)	115.687,19	123.987,75	130.605,41	134.127,52	139.735,25
	Produksi Daging yang diharapkan (Ton)	116.732,65	125.391,47	227.847,93	131.043,88	135.910,99

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, 2012

Mengacu pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah adalah cadangan pangan tertentu bersifat pokok, dimanfaatkan untuk bantuan darurat akibat bencana, pengendalian harga beras konsumen. Pengembangan cadangan pangan masyarakat dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat terutama pada lokasi yang rawan bencana dan terpengaruh masa paceklik. Pengisian lumbung pangan rata-rata 20 -30 ton gabah kering giling per unit lumbung. Pembangunan fisik lumbung bervariasi, dari sharing APBD Pemerintah Kabupaten, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana APBD Provinsi. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan: (1) tersedia cadangan pangan daerah dan terpenuhinya cadangan pangan bagi petani/anggota kelompok, (2) terjadinya akumulasi modal usaha kelompok sebagai pendorong ekonomi perdesaan yang berorientasi kemitraan usaha antar kelompok dan mitra usaha lainnya dan (3) terjadi perubahan perilaku anggota kelompok/petani yang selama ini langsung menjual hasil panennya ke pedagang, menjadi budaya menyimpan atau menunggu menjual padinya pada saat harga gabah naik.

Mulai tahun 2008 sampai 2012, pengembangan cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah yang telah dilaksanakan, seperti tertera dibawah ini

Tabel. 3: Ketersediaan Cadangan Pangan di Sumatera Utara Tahun 2008 – 2012

No./ Uraian	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Total
1. Cadangan Pangan Masyarakat (Lumbung Pangan Masyarakat)	14 unit	11 unit	33 unit	22 unit	31 unit	111 unit
2. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	14 unit (700 ton Gabah)	12 unit (240 ton gabah)	-	-	98,5 ton beras	692,58 ton beras

Sumber: Data BKP diolah

Progress/perkembangan Swasembada pangan di Sumatera Utara tahun 2008 – 2012 masih menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Dari hasil Perimbangan swasembada beras tahun 2012 Provinsi Sumatera Utara diperoleh angka Skor Swasembada Beras (SSB) 113,22 persen yang berarti bahwa produksi beras Sumatera Utara dapat memenuhi kebutuhan beras penduduk dan bahkan melebihi kebutuhan beras sebesar 13,22 persen per kapita . Ketersediaan beras sebesar 154,94 Kg/Kapita/Tahun (hanya berasal dari produksi lokal), bila dibandingkan dengan kebutuhan beras untuk konsumsi dan penggunaan non pangan sebesar 136,85 Kg/Kapita/Tahun, hal ini menunjukkan bahwa jika tidak ada perdagangan/pengiriman keluar daerah maka Sumatera Utara dapat memenuhi kebutuhan beras penduduknya. Walaupun demikian mengingat pengadaan beras impor masih terdapat dipasar perdagangan, maka dengan surplus beras sebesar 245.050 yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 1,5 bulan kedepan (kebutuhan per bulan 154.475 ton) , diperlukan kebutuhan tambahan cadangan pangan. Sebab untuk antisipasi pengamanan pangan perlu dipersiapkan cadangan/stok pangan, minimal untuk kebutuhan 3(tiga) bulan. Sementara Sumatera Utara terus mempromosikan pengurangan konsumsi beras sebesar 1,5 % pertahun dengan menggalakkan diversifikasi pangan melalui penggalian potensi pangan lokal dan penggalian kearifan lokal. Kebutuhan beras untuk konsumsi dan industry penduduk Sumatera Utara Tahun 2012 sebesar 136,85 Kg/kap/tahun. (Data Perkembangan Swasembada pangan beras di Sumatera Utara Tahun 2008 s.d Tahun 2012 tertera pada tabel berikut.

Tabel 4. Perkembangan Produksi, Kebutuhan dan Swasembada Beras di Sumatera Utara Tahun 2008 - 2012

Uraian	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
Jumlah Penduduk (jiwa)	12.834.371	13.398.495	13.207.954	13.375.695	13.545.566

Kebutuhan Beras (ton)	1.963.659	2.048.593	1.807.509	1.830.464	1.853.711
Produksi Beras (ton)	1.852.567	2.173.856	2.038.330	2.052.613	2.094.760
Perimbangan Beras/Surplus/Minus (ton)	-111.092	125.263	230.821	222.150	245.050
% SSB	94,34	106,11	112,77	112,14	113,22

Sumber: Dinas Pertanian PSU

Gambaran ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi dapat jiga ditunjukkan dari hasil Neraca Bahan Pangan (NBM) yang dihitung berdasarkan penjumlahan produksi domestik, impor neto, perubahan stok, dikurangi kebutuhan non konsumsi untuk benih. Industry non pangan, dan penggunaan lainnya. Berdasarkan hasil analisis NBM dalam tiga tahun terakhir periode 2010-2012, bahwa rata-rata kuantitas ketersediaan pangan per kapita per hari untuk energy mencapai 3.651 kilokalori dan protein 80,21 gram, sudah melebihi angka rekomendasi hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) VIII untuk ketersediaan energi 2.200 kilokalori dan protein 57 gram. Pada periode tersebut, ketersediaan energi naik rata-rata 9,08 persen per tahun tetapi protein turun rata-rata 4,89 persen per tahun. (Tabel 5.)

Tabel. 5. Perkembangan Rata-rata Ketersediaan Energi dan Protein Sumatera Utara Tahun 2010 -2013.

Uraian	Perkembangan Ketersediaan		Perkapita Per Hari		Pertumbuhan (%)
	2010	2011	2012	2013	
1.Energi k.kal/kap/hari	3.267,87	3.819,45	3.737	3.868,41	6,08
2.Protein gram/kap/hari	84,22	80,24	73,12	76,18	- 3,14

Sumber: Data NBM (diolah BKP)

Stabilitas Harga Pangan

Harga pangan yang merupakan unsur paling utama dalam distribusi selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu periode 2009 s/d 2013, secara umum terjadi kenaikan walaupun beberapa komoditi terjadi berfluktuasi secara tajam, seperti cabai merah dan daging ayam ras. Perkembangan harga bahan pokok strategis selama 5 (lima) tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 6. Perkembangan Harga Pangan Rata-Rata di Sumatera Utara Tahun 2009-2013

No.	**Komoditi**	**Tahun**					**Pertumbuhan (%)**
		2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	
1.	Beras						
	IR 64	6.167	6.490	8.757	8.349	8.716	9,98
	Ramos	6.800	7.037	8.738	8.914	9.529	9,14

	Arias KKB	6.997 7.050	7.013 7.034	8.625 8.638	8.694 8.855	9.608 9.880	8,63 9,17
2.	Kacang Tanah	12.642	13.557	16.222	16.659	16.584	7,28
3.	Bawang Merah	11.680	13.532	16.629	16.975	13.634	5,29
4.	Cabe Merah	20.517	18.986	33.889	30.341	21.061	7,49
5.	Gula Pasir	8.923	11.086	11.000	10.862	12.410	9,12
6.	Minyak Goreng	8.033	9.909	15.500	16.216	11.206	13,38
7.	Daging Sapi	61.391	65.779	67.625	69.004	76.257	5,63
8.	Daging Ayam Ras Buras	 20.340 38.741	 20.603 30.884	 22.063 38.083	 26.139 48.587	 22.441 51.051	 3,18 8,92
9.	Telur Ayam Ras Buras	 775 1.405	 940 1.707	 967 1.356	 980 1.574	 988 2.284	 6,58 15,53
10.	Ikan Tongkol Ikan Gembung Ikan Dencis	15.693 18.712 17.491	18.854 20.699 18.393	19.722 22.306 22.500	22.615 26.971 23.702	23.891 26.615 22.702	11,26 9,49 7,15

Sumber: Badan Ketahanan Pangan PSU, Tahun 2013

Dari tabel perkembangan harga pangan diatas dapat dilihat bahwa secara umum selama lima tahun terakhir harga pangan mengalami kenaikan, kenaikan harga tertinggi terjadi pada komoditi telur ayam buras dan minyak goreng yaitu 15,53 % dan 13,38 % per tahun sedangkan peningkatan harga terendah terjadi pada komoditi daging ayam ras yaitu 3,18 % per tahun (keadaan ini masih dapat ditolerir, masih dibawah 20 %).

Khusus mengenai harga gabah, dalam kurun waktu 5(lima) tahun terakhir yaitu tahun 2009 – 2013, telah dilaksanakan program stabilitas harga melalui pemberian bantuan Dana Penguatan Modal bagi Lembaga P-LDPM dan DPM-LUEP, dengan kegiatan ini stabilitas harga gabah dan jagung relative stabil dan umumnya tidak pernah dibawah HDPP/HPP meskipun dibeberapa wilayah pada saat-saat tertentu masih dijumpai harga gabah dibawah HDPP/HPP namum tidak terlalu lama.

Grafik. Perkembangan harga pangan 2009 – 2013 di Sumatera Utara

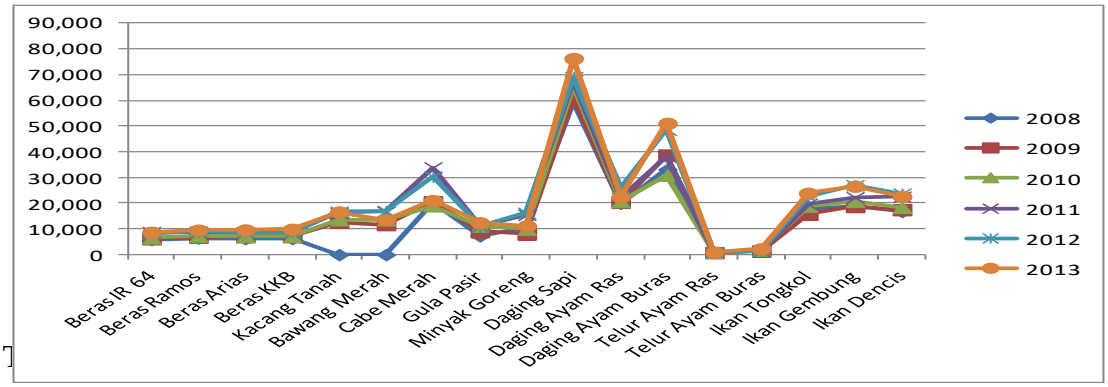

Tahun	HPP GKP (Rp/kg)	Harga GKP tkt petani	Harga rasio dengan HPP (%)
2010	2.640	2.815	106,62
2011	2.640	2.920	110,606
2012	3.300	3.814	115,57
2013	3.300	3.947	119,60
Pertumbuhan	20.0%	28,55 %	

Sumber: Badan Ketahanan Pangan PSU. Tahun 2013

Kemiskinan dan Rawan Pangan

Ketahanan pangan telah menjadi salah satu variabel strategis dalam pembangunan ekonomi daerah dan masih perlu mendapat perhatian. Hal ini ditandai masih adanya terdapat kejadian kerawanan pangan di beberapa daerah yang bersifat kronis dan transien yang terjadi secara mendadak. Kejadian kerawanan pangan kronis disebabkan oleh ketidak mampuan masyarakat menangani permasalahan kekurangan pangan yang disebabkan keterbatasan kepemilikan lahan,asset produktif dan kekurangan pendapatan atau kemiskinan .

Dalam upaya meningkatkan pengentasan kemiskinan, Pemerintah secara bertahap selalu mempersiapkan perencanaan dan implementasi program dan kegiatan yang dilaksanakan, antara lain melalui pemberdayaan masyarakat serta revitalisasi pertanian dan pedesaan.Melalui program/kegiatan tersebut, jumlah penduduk miskin selama tahun 2008 hingga tahun 2012 telah berhasil dikurangi secara significan dari periode sebelumnya.

Jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan dimana tahun 2012 menjadi 10,41% (1.375.723 Jiwa) dari 12,55 % (1.613.800 jiwa) tahun 2008 . jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan , hal ini menunjukkan semakin membaiknya perekonomian Sumatera Utara dan meningkatnya kinerja pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat miskin.

Perwujudan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kemandirian pangan, dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan di perdesaan. Strategi yang dihunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan melalui jalur ganda /twin track strategy, yaitu:

1. Membangun ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan.
2. Memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin di daerah rawan pangan melalui pemberdayaan dan pemberian bantuan langsung.

Penanganan daerah rawan pangan yang dilaksanakan di Sumatera Utara Tahun 2008 sampai 2012 antara lain berupa ;

1. Kegiatan penanggulangan daerah rawan pangan transien (pasca bencana;

2. Penguatan modal usaha kelompok (PMUK) pada daerah rawan pangan yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat di daerah rawan pangan /miskin melalui Program Aksi Gema Pangan (GEMA PANGAN
3. Melakukan koordinasi, pemantauan dan analisis setiap bulannya untuk mengetahui situasi pangan dan gizi secara dini yang nantinya digunakan untuk intervensi serta pengambilan kebijakan dan perumusan program ketahanan pangan,

1. Penyusunan Peta Kerawanan Pangan untuk mengetahui lokasi dan faktor penyebab terjadinya kerawanan pangan serta intervensi hasil penyusunan melalui pemberian bantuan dan Penguatan modal usaha kelompok (PMUK) untuk kategori rawan dan agak rawan pangan.
2. Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan melalui program aksi Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) di desa /kelurahan miskin.

Kondisi sangat rawan pangan diukur dari konsumsi energi <1.400 Kkal/hari. Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini masih menghadapi kondisi rawan pangan. Dari data Susenas tahun 2009, diketahui bahwa angka proporsi penduduk sangat rawan pangan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 14,48% atau masih berada diatas angka rata-rata nasional sebesar 14,47%.dan hasil Survey pemantauan masyarakat yang mengalami defisit angka kecukupan energy (AKE) tahun 2012 menyatakan jumlah penduduk miskin Sumatera Utara sebesar 10,67 % dan jumlah rumah tangga miskin yang tergolong rawan pangan dan sangat rawan pangan (AKE < 1400 k.kal) sebesar 37,0 % atau sebesar 3,94 % dari jumlah penduduk Sumatera Utara.

Perbandingan proporsi penduduk miskin dan rawan pangan serta tahan pangan tahun 2010 dan 2012 berdasarkan AKE (Angka Kecukupan Energi) tertera pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Perbandingan Proporsi Penduduk Miskin, Sangat Rawan, Rawan dan Tahan Pangan di Sumatera Utara Tahun 2010 dan 2012

Tahun	Penduduk Miskin (%)	Proporsi Sangat Rawan Pangan (%)	Proporsi Rawan Pangan (%)	Proporsi Tahan Pangan (%)
2010	11,38	3,6	33,8	62,6
2012	10,67	2,1	34,9	63,0

Sumber : BKP PSU

Tahun 2012 Badan Ketahanan Pangan juga melaksanakan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (Food Security Vulnerability Atlas (FSVA) Provinsi Sumatera Utara ,dari penyusunan diperoleh hasil yaitu :

- Sangat Rawan terdapat di hanya satu kecamatan yaitu Kutalimbaru Langkat.
- Rawan Pangan terdapat di dua kecamatan yaitu : Moro'o Nias Barat dan Muara Batang Toru Tapanuli Selatan.
- Agak Rawan Pangan tersebar di 14 kecamatan yaitu ; Ulugawo; Ma'u ; Somolo-molo dan Botomuzoi di Kabupaten Nias. Kecamatan Lahewa Timur dan Lahewa di Kabupaten Nias Utara. Kecamatan Ulu Moro'o; Lolofitu Moi;

Mandrehe Utara dan Mandrehe di Kabupaten Nias Barat. Kecamatan Hibala dan Pulau Batu di Kabupaten Nias Selatan. Kecamatan Muara Batang Gadis di Kabupaten Mandailing Natal dan Kecamatan Pandan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Penganekaragaman Konsumsi

Keragaman konsumsi pangan masyarakat dengan indicator skor Pola Pangan Harapan (PPH), menunjukkan bahwa skor mutu konsumsi pangan penduduk Sumatera Utara periode 2008 – 2012 terjadi fluktuasi. Hal ini diindikasikan terjadinya penurunan Skor PPH dari 79,4 pada tahun 2008 menjadi 74,5 pada tahun 2009. Berdasarkan hasil survey sosial ekonomi nasional (Susenas), rata-rata konsumsi pangan perkapita perhari penduduk selama periode 2008 – 2011 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat. Pada tahun 2008 , tingkat konsumsi energi penduduk Sumatera Utara sebesar 2.074,7 k.kal per kapita perhari dan tingkat konsumsi protein sebesar *60,13 gram per kapita perhari , keadaan ini telah melebihi anjuran bila dibandingkan dari angka kecukupan yang dianjurkan WNPG(Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi)* VIII tahun 2004 konsumsi kalori sebesar 2000 k.kal dan protein 52 gr per kapita perhari . Perkembangan konsumsi energi dan protein selama tahun 2009 – 2012 disajikan pada tabel 10.

Dalam rangka memantapkan konsumsi pangan masyarakat maka kegiatan Penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam bergizi dan berimbang yang diarahkan kepada pemberdayaan dan pemanfaatan potensi pangan lokal serta mengurangi ketergantungan masyarakat bahan pangan pokok beras, telah dilaksanakan berbagai kegiatan dan kegiatan tersebut tetap akan dilanjutkan kesinambungannya pada tahun – tahun mendatang. Keberhasilan dari pada pemasyarakatan konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang tersebut sangat ditentukan oleh budaya, daya beli, pengetahuan dan kemauan masyarakat. Keadaan ini mengakibatkan Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu pengkonsumsi beras tertinggi di Indonesia yaitu mencapai 134,80 Kg / kapita / tahun pada tahun 2011.

Rata-rata konsumsi kalori dan protein penduduk Sumatera Utara menurut jenis bahan Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Rata-rata konsumsi kalori dan protein per hari penduduk Sumatera Utara Tahun 2011

No.	Uraian	Perkotaan / Urban		Perdesaan / Rural		Perkotaan + Perdesaan	
		Kalori (kkal/kap/hr)	Protein (gr)	Kalori (kkal/kap/hr	Protein (gr)	Kalori (kkal/kap/hr	Protein (gr)
1.	Padi-padian	852,30	19,94	1.188,85	27,82	1.023,36	23,94
2.	Umbi-umbian	18,46	0,24	40,83	0,39	29,83	0,31
3.	Ikan	71,49	12,37	82,10	14,39	76,88	13,40
4.	Daging	38,32	2,33	32,79	1,74	35,51	2,03

5.	Telur dan susu	63,39	3,89	44,79	2,82	53,94	3,35
6.	Sayuran	33,09	2,19	41,57	2,92	37,40	2,56
7.	Kacangan2an	36,46	3,24	26,66	2,45	31,48	2,84
8.	Buah-buahan	38,34	0,43	45,71	0,48	43,00	0,46
9.	Minyak&lemak	287,09	0,43	289,02	0,76	288,07	0,60
10.	Bahan minuman	102,82	0,56	104,01	0,82	103,43	0,69
11.	Bumbu-bumbu	11,69	0,46	13,42	0,51	12,57	0,48
12.	Konsumsi lain	39,98	0,84	38,76	0,81	39,36	0,83
13.	Makanan jadi	255,76	7,80	182,98	4,45	218,77	6,09
	Jumlah	**1.849,19**	**54,71**	**2.133,30**	**60,36**	**1.993,59**	**57,58**

Sumber: BPS-Sumut

Dari angka diatas, diketahui jumlah konsumsi kalori/energi penduduk Sumatera Utara sebesar 1.993,59 k.kal/kap/hari, konsumsi protein sebesar 57,58 gr/kap/har, konsumsi kalori/energi nasional tahun 2011 sebesar 1.952 k.kal/kap/hari dan konsumsi protein sebesar 59,98 gr/kap/hari. Menurut anjuran WNPG VIII tahun 2004, angka kecukupan konsumsi kalori sebesar 2.000kkal/kap/hari dan konsumsi protein sebesar 52 gr/kap/hari. Bila dibandingkan dengan Nasional, maka Sumatera Utara termasuk baik, artinya konsumsi kalorinya sudah diatas rata-rata nasional, tetapi masih dibawah anjuran WNPG VIII (98,54% dari anjuran). Konsumsi protein penduduk Sumatera Utara termasuk dibawah konsumsi rata-rata nasional (95,53% dari rata-rata nasional), tetapi sudah termasuk diatas anjuran WNPG III (109,84 % dari anjuran).

Tabel 10. Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein Penduduk Sumatera Utara Perkapita Perhari dan Skor PPH Tahun 2009 – 2013

Uraian	Perkembangan Konsumsi Perkapita Perhari					Pertumbuhan (%)
	2009	2010	2011	2012	2013	
Energi (kkal/kap/hari)	1.921,7	1.970,8	1.994	1.892,36	1.997,2	1,04
Protein (gram/kap/hari)	55,0	57,1	57,6	54,15	62,8	3,67
Skor PPH	74,5	78,7	76,3	82,4	83,6	3,02

Sumber: BKP PSU (Data diolah)

Keamanan Pangan

Situasi keamanan pangan di Sumatera Utara selama lima tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2008 hingga tahun 2012 masih didominasi oleh dua hal, yaitu ; (a) keberadaan residu pestisida pada berbagai jenis hasil pertanian terutama pada sayur, buah dan pangan segar; dan (b) perilaku produsen makanan jajanan yang menggunakan zat pengawet, zat pewarna, dan zat pemanis buatan yang tidak sesuai ketentuan. Kedua hal tersebut dapat menimbulkan keracunan pada makanan, bahkan dapat menjadi salah satu penyebab penyakit bawaan makanan /PBM (*food borne diseases*) bagi konsumen. Hal ini disebabkan adanya cemaran racun kimia atau toxin, logam berat, dan bahan kimia lainnya, serta cemaran mikroba dari bakteri, jamur, parasit, dam virus. Kasus keracunan pada bahan pangan segar di berbagai jenis buah dan sayur, terutama disebabkan oleh residu pestisida yang digunakan untuk pemberantasan hama dan penyakit yang masih tertinggal melebihi ambang batas yang ditetapkan untuk kesehatan manusia.

Cemaran oleh mikroba disebabkan karena rendahnya kondisi higienis dan sanitasi, sedangkan cemaran kimia karena kondisi lingkungan yang tercemar limbah industri, penyalahgunaan bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan seperti formalin, rhodamin B, boraks, dan methanol yellow, serta penggunaan Bahan Tambahan Pengawet (BTP) dan pemanis yang melebihi batas maksimal yang dijinkan.

Berdasarkan hasil pemantauan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara, secara umum masih terjadi kasus keracunan makanan pada anak-anak terutama pada anak sekolah, yang berasal dari jajanan anak sekolah. Selama tahun 2010, ditemui satu kasus yaitu keracunan makanan pada 15 mahasiswa akademik yang diduga dari snack. Tahun 2011 , ditemui empat kasus, yaitu tiga kasus keracunan yang menimpah 61 anak murid SD akibat makan bakso kojek dan soft drink , dan satu kasus mengakibatkan tewas keracunan soft drink produk rumah tangga . Tahun 2012, 40 orang anak SD nyaris tewas akibat makan bakso kojek.

Khusus untuk produk pangan segar hasil pertanian, tuntutan akan adanya suatu jaminan kepastian produk pertanian bermutu maupun aman menjadi prioritas utama dalam perdagangan produk-produk pertanian secara luas. Kondisi tersebut menjadikan kepastian mutu dan keamanan pangan menjadi salah satu parameter daya saing produk pertanian. Tuntutan jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian khususnya dari Provinsi Sumatera Utara dipasar Domestik maupun Internasional perlu diantisipasi dengan sebaik-baiknya agar tidak menghambat kelancaran produksi maupun pemasaran komoditas pangan hasil pertanian. Badan Ketahanan Pangan Sumatera Utara sesuai dengan kompetensinya sebagai instansi pelaksana Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 521.23/3260/K/Tahun 2004 tentang Penunjukan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara sebagai Instansi Yang Berwewenang (Otoritas Kompetensi) untuk memberikan sertifikasi PRIMA bila sudah sesuai procedure. Dalam Penanganan Keamanan dan Mutu Pangan Buah dan Sayuran Segar di Provinsi Sumatera Utara ,sejak tahun 2011 telah melaksanakan sertifikasi buah dan sayuran segar yaitu untuk sepuluh jenis sayuran dan buah segar (pakchoy, buncis, selada, sawi, marquisa ungu dan jeruk manis, kentang, nenas, salak dan pisang barangan) dan tahun 2012 melaksanakan sertifikasi pada tujuh jenis sayuran yaitu : sawi, buncis,selada,nenas, kentang dan kubis. Dalam

mekanisme pelaksanaan sertifikasi PRIMA pada buah dan sayuran segar beberapa tahapan yang dilalui/dipenuhi yaitu:

1. Petani/kelompok tani buah maupun sayuran mengajukan permohonan secara tertulis kepada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara selaku ketua OKKP-D dengan melampirkan fotocopy KTP yang masih berlaku disertai dengan denah lokasi kebun.
2. Tim OKKP-D melakukan penilaian permohonan tentang kelengkapan dokumen/berkas permohonan dari kelompok tani (permohonan) serta audit kecukupan dokumen system jaminan mutu.
3. Tim melakukan inspeksi awal pada kelompok tani (pemohon) yaitu dengan meneliti kesesuaian persyaratan sebagaimana terdapat pada SOP komoditi yang dimohonkan untuk sertifikasi. Hasil inspeksi/penilaian dilaporkan kepada ketua OKKP-D,
4. Ketua OKKP-D menerima hasil inspeksi, maka selanjutnya OKKP-D menugaskan tim teknis untuk melakukan pengujian. Apabila tim teknis menemukan hal-hal yang meragukan, maka dapat dilakukan peninjauan kembali ke lapangan.
5. Ketua OKKP-D mengambil keputusan pemberian sertifikasi atau penolakan terhadap permohonan sertifikasi setelah mempertimbangkan saran dari tim teknis.

Akses Pangan

Aksesibilitas atau keterjangkauan pangan oleh masyarakat dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain: harga pangan, tingkat pendapatan atau daya beli, kestabilan keamanan social, anomali iklim, bencana alam, jarak lokasi dan topografi wilayah, keberadaan sarana dan prasarana transportasi, kondisi jalan perhubungan, dan lainnya.

Permasalahan akses pangan secara fisik masih disebabkan oleh kurang memadainya kondisi sarana dan prasarana (infrastruktur) di Sumatera Utara. Fasilitas prasarana jalan, pelabuhan dan sarana angkutan yang kurang memadai menyebabkan biaya distribusi dari sentra produksi ke sentra konsumsi menjadi mahal. Akses masyarakat terhadap pangan secara umum cukup baik sesuai dengan tingkat pendapatan masyarakat. Namum bagi masyarakat miskin akses terhadap pangan pokok masih mengkhawatirkan karena kemampuan daya beli yang rendah, meskipun secara fisik pangan tersedia sampai ke pelosok desa, namum jika kemampuan daya beli masyarakat yang rendah maka akan menghambat untuk memperoleh pangan yang cukup.

Tabel 11. Pengeluaran Rata-rata Perkapita dan Per Rumah Tangga Sebulan Penduduk Sumatera Utara Tahun 2010 – 2012

N0.	Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1.	**Per Kapita (Rp)**			
	-Makanan	236.917	316.343	344.467
	-Bukan makanan	195.472	248.222	254.593
	-Total Pengeluaran	432.389	564.565	599.060
	- PDRB per kapita(atas	21.236.780	23.974.860	25.568.860

	dasar harga berlaku.)			
2.	**Per RT (Rp)** -Makanan -Bukan makanan -Total Pengeluaran	 1.018.743 840.529 1.859.272	 1.328.640 1.042.532 2.371.173	 1.446.761 1.069.290 2.516.052

Sumber: data BPS diolah BKP-PSU

Jumlah pengeluaran penduduk/masyarakat terhadap konsumsi dan non konsumsi adalah salah satu gambaran akses pangan masyarakat. Perkembangan jumlah pengeluaran masyarakat terhadap konsumsi selama tiga tahun terakhir tertera pada tabel 11.

Dari tabel diatas, terlihat pengeluaran konsumsi penduduk Sumatera Utara terus meningkat, hal ini menunjukkan bahwa akses pangan masyarakat sudah meningkat dari tahun 2010 – 2012. Demikian juga pendapatan regional bruto rata-rata per kapita pertahun , mengalami kenaikan dari Rp. 21.236.780/tahun atau Rp. 1.769.731,- per bulan menjadi Rp 25.568.860/tahun atau Rp 2.130.738,- per bulan.

Capaian Kegiatan dan Anggaran

Selama tahun 2009 – 2013 , Anggaran pembangunan ketahanan di Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari APBD dan APBN tertera pada tabel berikut .

Tabel 12. Perkembangan Anggaran Pembangunan Ketahanan Pangan yang berasal dari APBD dan APBN .

No.	**Tahun Anggaran**	**APBD**			**APBN**		
		Pagu (x Rp .000)	Realisasi (xRp. 000)	%	Pagu (x Rp.000)	Realisasi (xRp. 000)	%
1.	2009	17.633.553	16.949.101	96,12	10.231.000	10.074.851	98,47
2.	2010	34.882.495	34.430.848	98,71	10.444.100	9.974.462	95,50
3.	2011	19.022.294	18.874.804	99,22	10.996.114	10.809.180	98,3
4.	2012	43.998.811	43.567.097	90,34	10.264.800	9.876.790	96,22
5.	2013	21.894.093	19.598.185	89,51	6.913.050	6.418.766	92,85

Ket; APBD termasuk belanja langsung dan tidak langsung

Sumber: Badan Ketahanan Pangan PSU, Tahun 2013

B. Peternakan

Pencapaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara yang telah dilaksanakan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat digambarkan melalui tiga indicator utama yaitu, populasi, produksi, dan konsumsi hasil ternak.

Pencapaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara yang telah dilaksanakan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat digambarkan melalui tiga indicator utama yaitu, populasi, produksi, dan konsumsi hasil ternak.

Perkembangan Populasi

Capaian perkembangan populasi bervariasi, ada yang mengalami kenaikan, dan ada juga yang mengalami penurunan. Jenis ternak yang mengalami penurunan populasi adalah sapi perah, kerbau, ayam buras, dan ayam ras pedaging. Sementara itu, komoditas sapi potong, kuda, kambing, domba, babi, ayam ras petelur, dan itik mengalami peningkatan populasi. Rasio realisasi terhadap target yang tertinggi (1,4) dicapai oleh ternak sapi potong dan terrendah oleh ternak kuda (0,86).

Rekomendasi pengembangan populasi

Masalah utama pada penurunan populasi adalah kurang baiknya mutu bibit ternak, pemberian pakan yang seadanya, dan minimalnya pengendalian hama dan penyakit. Oleh karena itu, penurunan populasi dapat dihindari melalui upaya-upaya strategis berupa peningkatan keberhasilan IB, penyediaan pejantan unggul, pengembangan VBC (Village Breeding Centre) yang melakukan proses seleksi dan culling secara ketat. Pemberian pakan harus sesuai dengan kebutuhan dalam filosofi ransum serasi dan seimbang yang didukung oleh pemanfaatan bahan pakan lokal. Untuk menekan tingkat mortalitas maka perlu diupayakan langkah strategis berupa vaksinasi yang tepat, sanitasi yang reguler, serta pengobatan yang tepat waktu.

Perkembangan produksi

Peningkatan produksi daging terjadi selama lima tahun berturut-turut, namun demikian tingkat capaian masih dibawah target produksi (0,89 – 0,96). Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya produktivitas ternak sumber daging yang dipelihara. Untuk produksi telur, juga terihat peningkatan selama 5 tahun terakhir, tetapi pencapaian target baru diperoleh pada tahun 2012 dan 2013, masing-masing dengan rasio 1,05 dan 1,04. Produksi susu mengalami penurunan sejak tahun 2010 sampai dengan 2013 dengan rasio 0,87 (2009) dan menurun menjadi 0,26 pada tahun 2013.

Rekomendasi peningkatan produksi

Untuk semua jenis ternak yang dikembangkan perlu dilakukan upaya peningkatan produksi dan produktivitas ternak melalui penerapan sapta usaha peternakan dengan pendekatan agribisnis. Sapta usaha peternakan meliputi : 1. Bibit unggul; 2. Pakan; 3. Perkandangan; 4. Kesehatan; 5. Perkembangbiakan; 6. Managemen; dan 7. Pemasaran.

Perkembangan konsumsi

Sejalan dengan perkembangan produksi selama lima tahun terakhir, terlihat bahwa tingkat konsumsi daging, dan telur juga mengalami peningkatan. Sedangkan konsumsi susu mengalami penurunan secara drastis dari 0,13 liter/kap/tahun (2009) menjadi 0,06 liter/kap/tahun pada tahun 2013.

Rekomendasi peningkatan konsumsi

Berdasarkan kecukupan gizi maka jumlah asupan protein per hari sebaiknya berada pada tingkat 55 gram/kapita (WKNPG, 2004). Dengan asumsi bahwa kontribusi protein hewani terhadap total asupan protein adalah 35%, maka berdasarkan pola konsumsi yang ada diharapkan 14% berasal dari ikan, 10% berasal dari daging dan 10% berasal dari telur, serta 1% dari susu. Dengan asumsi target asupan protein di atas, maka dapat dihitung jumlah kebutuhan terhadap daging sebesar 9,84 kg/kap/th, telur 15,13 kg/kap/th, dan terhadap susu sejumlah 2,81 kg/kap/th. Produksi susu yang dilaporkan pada tahun 2010 adalah 1.850 ton, jauh di bawah angka kebutuhan dan oleh karenanya terlihat di Sumatera Utara tingkat swasembada susu masih jauh dari mencukupi. Selain sapi perah, ternak penghasil susu lainnya adalah kambing perah dan kerbau perah. Sangat disayangkan bahwa eksistensi kedua jenis komoditas ternak tersebut belum terdata dengan baik. Mengingat begitu rendahnya kecukupan susu ini, sangat diharapkan pengembangan populasi maupun produktivitas ketiga komoditas ternak perah di atas terus ditingkatkan.

Perencanaan anggaran pada SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada periode 2009-2013 masih kurang rasional, apalagi dikaitkan dengan realisasinya (Lampiran 2). Hal ini tergambar pada beberapa hal antara lain a) target PAD dari hasil retribusi tahun 2009 dan 2010 sangat melonjak, namun realisasinya menurun, b) target dan realisasi PAD 2011-2013 tidak ditargetkan, c) target belanja daerah dari tahun 2009-2012 dan realisasinya mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2013, targetnya menurun dari Rp. 8.256.648.000,- (2012) menjadi Rp. 4.207.963.259,- (2013), namun realisasinya sampai dengan September 2013 telah mencapai Rp. 5.349.203.481,-. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran belum dilakukan secara teliti. Oleh karena itu, kedepan diharapkan agar perencanaan anggaran dapat dilakukan secara lebih baik serta mengacu kepada kebutuhan percepatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Sumatera Utara.

Kegiatan inseminasi buatan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012 dilaksanakan di 19 kabupaten/kota. Target distribusi semen beku ternak sapi pada tahun 2012 adalah 75.000 dosis dan untuk semen beku kambing/domba belum ada target karena masih dalam tahap introduksi, sedangkan inseminator ternak kambing/domba serta peralatannya masih sangat terbatas, dan untuk semen beku ternak kerbau Provinsi Sumatera Utara masih tahap sosialisasi kepada peternak.

Dari 75.000 dosis yang ditargetkan untuk distribusi semen beku, telah terealisasi sebesar 77.933 dosis meningkat dibandingkan distribusi tahun 2011 yaitu 70.843 dosis. Realisasi pelaksaaan inseminasi buatan (IB) baik pada sapi potong maupun sapi perah adalah sebesar 68.451 dosis meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 65.212 dosis. Jumlah akseptor IB pada tahun 2012 baik pada sapi potong dan sapi perah sebanyak 56.758 meningkat dari tahun 2011 yaitu 54.019 ekor. Dan kelahiran hasil inseminasi buatan pada tahun 2012 adalah 37.388 ekor merupakan sebagian dari hasil pelaksanaan kegiatan inseminasi buatan pada tahun 2011 dan sebagian dari tahun 2012 sendiri. Jumlah kelahiran yang diperoleh berasal dari laporan petugas dari kabupaten/kota yang mengirimkan laporannya. Sampai dengan akhir Desember 2012. Jika dibandingkan dengan jumlah kelahiran hasil inseminasi buatan pada tahun 2011 yaitu 35.015 ekor.

Realisasi distribusi semen beku ternak kambing/domba sebesar 657 dosis yaitu kambing 257 dosis dan domba 400 dosis. Realisasi pelaksanaan inseminasi buatan (IB) pada kambing adalah 88 dosis dan domba 155 dosis. Jumlah akseptor kambing 88 ekor dan domba 155 ekor dengan kelahiran kambing 10 ekor dan domba 81 ekor.

Pada tahun 2012 semen beku kerbau yang telah didistribusikan adalah 312 dosis. Realisasi pelaksanaan inseminasi buatan (IB) pada kerbau 33 dosis dengan jumlah akseptor sebanyak 32 ekor dan kelahiran 15 ekor. Untuk lebih jelas rincian target, distribusi semen beku, realisasi pelaksanaan inseminasi buatan dan kelahiran T.A 2012 dapat dilihat pada lampiran.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Telaahan RTRW Provinsi Sumatera Utara 2013-2033. Rencana Pengembangan Pola Kawasan Budidaya. Arahan pola pemanfaatan ruang baik ruang darat maupun ruang laut untuk kegiatan budidaya mencakup arahan pemanfaatan kawasan hutan produksi, kawasan hutan tanaman rakyat, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan perikanan dan kelautan, kawasan peternakan, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan industri, kawasan permukiman dan kawasan peruntukan budidaya lainnya.

Penentuan bagi arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya didasarkan pada pertimbangan berikut :

1. Kesesuaian lahan, yang merupakan hasil penilaian terhadap kemampuan atau daya dukung lahan terhadap kegiatan penggunaan lahan tertentu.
2. Potensi pengembangan dan kegiatan budidaya, yang merupakan hasil penilaian ekonomi dan keruangan terhadap potensi pengembangan budidaya tertentu.

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Peternakan. Budidaya kawasan peternakan terdiri atas budidaya peternakan besar dan peternakan kecil/unggas. Lokasi kegiatan peternakan diarahkan sesuai dengan lokasi kegiatan pertanian pada lahan kering, maupun perkebunan.

Rencana pengembangan jenis ternak besar potensial dilakukan di Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Toba Samosir, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Labuhan Batu, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal dan Kepulauan Nias, Nias Utara, Nias Barat, dan Nias Selatan.

Pengembangan kawasan budidaya peternakan hewan kecil dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perternakan hewan kecil meliputi seluruh kabupaten kota.

Telaahan KLHS Provinsi Sumatera Utara 2013-2018. Faktor pendorong yang diperkirakan akan mempengaruhi kecenderungan masa depan adalah belum ada kawasan peternakan yang terpadu dengan fasilitas pembangkit listrik tenaga bio gas. Perkiraan dampak negatif dan positif dari faktor pendorong terhadap kecenderungan masa depan adalah sulit mengembangkan energi listrik tenaga biomassa akibat

kawasan peternakan yang tidak direncanakan secara terpadu dengan pembangkit listrik.

Dampak negatif peningkatan produksi hasil peternakan diikuti dengan pertumbuhan jumlah ternak yang berimplikasi pada kotoran ternak sehingga berdampak negatif terhadap pencemaran air tanah dan pencemaran Udara serta berpotensi terhadapi alih fungsi lahan khususnya yang berfungsi lindung akan terjadi terutama pada peternakan rakyat yang melepaskan ternaknya untuk memenuhi pakannya sendiri**.**

Mitigasi. Pengelolaan kotoran ternak menjadi biogas serta pengelolaan limbah cair peternakan dengan teknologi lingkungan tepat guna terutama pada kelompok-kelompok peternakan rakyat, serta pengembangan industri pakan ternak yang terjangkau peternakan rakyat.

Rekomendasi. Dalam peta Pola ruang RTRW Kab/kota pemanfaatan ruang bagi lokasi peternakan secara eksplisit sebaiknya sudah diplotkan sebagai deliniasi kawasan budidaya.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sub Sistem Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah pada kemandirian pangan, masalah pangan global merupakan krisis akses pangan yang terkait dengan masih tingginya angka kemiskinan di dunia khususnya bagi nagara-negara miskin dan berkembang, sehingga apabila tidak diatasi bersama akan mengancam keamanan dunia bahkan menimbulkan krisis social. Krisis pangan global yang melanda dunia saat ini memang belum memberikan imbas yang relative besar terhadap Indonesia umumnya atau Sumatera Utara Khususnya, hal ini disebabkan iklim di Indonesia masih mendukung produksi pangan, namun demikian untuk lima tahun kedepan kemandirian pangan akan menghadapi tantangan yang cukup serius baik dari aspek ketersediaan dan kerawananan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan maupun aspek manajemen ketahanan pangan. Swasembada dan Swasembada berkelanjutan harus tetap diperhatikan untuk menjamin ketahanan pangan nasional.

Perubahan iklim mengakibatkan degradasi kesuburan lahan yang berdampak terhadap pemicu penurunan luas pertanaman dan produksi .Data perkembangan luas panen dari Dinas pertanian menunjukkan telah terjadi penyusutan lahan padi sawah dan padi ladang selama 10 tahun terakhir, meski angka penyusutan tidak merata sepanjang tahun, tetapi trend penyusutan lahan terus terjadi. Tahun 2011 terjadi bencana kekeringan tanaman padi sawah di Sumatera Utara mencapai 5.599,6 Ha, jumlah ini dikalikan dengan rata-rata produksi per hektar berarti Sumatera Utara mengalami ancaman potensi kehilangan hasil padi sawah sebesar 27.288,85 ton, begitu juga bencana alam banjir telah menyebabkan penurunan produksi padi pada lahan sawah seluas 10.439,4 Ha, jika dikalikan dengan rata-rata per hektar maka bencana banjir berpotensi menurunkan produksi sebanyak 50.871,20 ton. Disisi lain penurunan luas pertanaman terjadi karena berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian dan menurunnya luas areal persawahan irigasi. Untuk kebutuhan komsumsi penduduk, Sumatera Utara masih tergolong surplus tetapi penyiapan pangan sebagai antisipasi penanganan cadangan pangan yang berasal dari produksi hanya dapat memenuhi selama ± 3 bulan kedepan , keadaan ini hanya memenuhi angka minimal , untuk itu sangat dibutuhkan cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah daerah untuk antisipasi masalah kekurangan pangan terutama di daerah- daerah kantong kemiskinan/rawan pangan maupun bencana alam transien. Meskipun penyediaan cadangan pangan adalah salah satu indicator standar pelayanan minimal (SPM) bidang ketahanan pangan, namun sampai saat ini hanya beberapa kabupaten yang mempunyai cadangan pangan di wilayahnya. Pengelolaan kelembagaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat belum berkembang secara optimal. Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan dan kelompok masyarakat rawan

pangan dihadapkan pada kendala sarana dan infrastruktur serta kemampuan tenaga pendamping dan penyuluh lapangan, jumlah penduduk rawan pangan masih cukup besar, meskipun telah menunjukkan trend yang menurun.

Subsistem Distribusi dan Akses Pangan

Kestabilan harga dan rendahnya efisiensi system pemasaran hasil-hasil pangan pada saat ini merupakan kondisi yang kurang kondusif bagi produsen maupun konsumen. Hal ini antara lain disebabkan karena lemahnya disiplin dan penegakan peraturan untuk menjamin system pemasaran yang adil dan bertanggung jawab, terbatasnya fasilitas perangkat keras maupun lunak untuk membangun transparansi informasi pasar. Penurunan harga pada saat panen raya cenderung merugikan petani, sebaliknya pada saat tertentu pada musim paceklik dan hari- hari besar harga pangan meningkat tinggi menekan konsumen, tetapi harga tersebut sering tidak dinikmati oleh petani produsen. Terbatasnya kelembagaan yang menyediakan permodalan bagi petani dan procedure penyaluran yang kurang mengapresiasikan sifat usahatani dan resiko yang dihadapi, merupakan kendala bagi berkembangnya usahatani.. Demikian juga, kurang memadainya sarana dan prasarana fisik transportasi menjadi kendala berkembangnya industri hulu dan hilir sebagai wahana bagi peningkatan pendapatan petani di perdesaan dan tingginya biaya pemasaran bahan pangan di beberapa daerah konsumen.

Subsistem Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan

Dalam mengembangkan produksi bahan pangan dan mengembangkan diversifikasi pangan harus mengacu pada sumberdaya lokal dan budaya lokal yang ada dan pola makan yang dianut oleh masyarakat. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah, yang dicirikan pada pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi seimbang dan aman. Kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan menuju pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, Antara lain; 1). Keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga; 2) keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi; 3) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; 4) lambatnya perkembangan, penyebaran dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan , nilai gizi, nilai ekonomi ,nilai social, citra dan daya terima; 5) adanya pengaruh globlisasi industry pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum; 6) adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam,bergizi seimbang dan aman (B2SA). Sampai saat ini, pembinaan penganekaragaman konsumsi pangan yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan masih belum optimal, yang ditandai oleh ; 1) keterbatasan dalam memberikan dukungan program usaha bagi dunia usaha dan asosiasi yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal; dan 2) kurangnya fasilitas pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam,bergizi seimbang dan aman;3) dukungan sosialisasi, promosi dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media, masih terbatas; dan 4) masih sedikitnya informasi menu/kuliner berbasis pangan lokal.

Hasil pemantauan danevaluasi menunjukkan, bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam penanganan keamanan pangan, Antara lain: 1). Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan, terutama produk pangan segar; 2). Masih banyaknya petani belum memahami dan menerapkan cara-cara budidaya dan produksi pertanian yang baik dan benar; 3) belum efektifnya penanganan keamanan pangan, karena system yang dikembangkan, SDM dan pedoman masih terbatas; 4). Merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan segar;5) standar keamanan pangan untuk buah dan sayuran segar impor belum jelas diterapkan, sehingga buah impor yang belum terjamin keamanan pangannya masih mudah masuk kedalam negeri; 6) belum adanya penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum di bidang pangan segar; 7) koordinasi lintas sector dan subsector terkait dengan keamanan pangan belum optimal; dan 8) Masih rendahnya kesadaran pihak pengusaha/pengelola pangan untuk menerapkan peraturan/standar yang telah ada.

Peternakan dan Kesehatan Hewan

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan terhadap tugas dan fungsi SKPD, dapt dilihat bahwa BIdang Kesekretariatan, Bidang pengembangan sarana dan prasaranan (kuhusnya pakan), dan budidaya ternak memiliki capaian sangat baik.

Tabel. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kesekretariatan	87,04 % (sangat baik)	Evaluasi 2011	SDM, Sarana, Prasarana, Dana	Koordinasi	Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kurang memadai
2. Pengembangan sarana dan prasarana peternakan					
a. Perbibitan	49,47 % (cukup)	Evaluasi 2011	SDM, Dana	Sumber Daya, Koordinasi	Kompetensi SDM belum memadai
b. Pakan	92,59 % (sangat baik)	Evaluasi 2011	SDM, Dana	Sumber Daya Pakan	Penyimpanan terbatas
3. Budidaya ternak	85,27% (sangat baik)	Evaluasi 2011	SDM, Dana	Koordinasi, Teknologi	Penerapan teknologi masih rendah, wilayah kerja luas
4. Kesehatan hewan	47,89% (cukup)	Evaluasi 2011	SDM, Sarana, Prasarana, Dana	Koordinasi	Rendahnya partisipasi masyarakat.
5. Usaha peternakan	60,0 % (cukup)	Evaluasi 2011	SDM, Dana	Koordinasi	Skala usaha kecil

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Kesmavet	77,02 % (baik)	Evaluasi 2011	SDM, Sarana, Prasarana, Dana	Perda, kesadaran masyarakat	Komitmen Pemda belum optimal, kesadaran masyarakat masih rendah.
7. Inseminasi Buatan	65,0% (baik)	Evaluasi 2011	SDM, Dana	Sumberdaya	Kualitas semen beku belum optimal

Walaupun demikian, masih dijumpai permasalahan utama dalam hal belum memadainya jumlah dan kualitas sarana serta prasarana, dan masih kurangnya penerapan teknologi tepat guna. Kondisi menjadi semakin sulit dengan luasnya wilayah kerja.

Untuk bidang Kesmavet dan Inseminasi Buatan, capaiannya baik, namun juga masih menghadapi persoalan di bidang komitmen Pemda yang belum belum optimal, dan kesadaran masyarakat yang masih rendah, serta kualitas semen beku yang belum optimal.

Bidang kesehatan hewan, usaha peternakan, dan pengembangan sarana dan prasarana peternakan khusunya perbibitan, capaiannya masih dalam kategori cukup. Hal ini diduga berkaitan dengan permasalahan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, skala usaha yang masih kecil, dan kompetensi SDM yang belum memadai untuk mengelola perbibitan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara tersebut dianggap sebagai tantangan pengembangan. Ragam tantangan yang ada dalam 5 tahun terakhir ini mencakup sebagai berikut:

1) Minimnya petugas teknis lapangan (Penyuluh, Inseminator, Petugas kecamatan, petugas kesmavet, petugas kesehatan hewan dan petugas teknis lainnya), serta sarana dan prasarana yang dimilikinya.
2) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia pelaku utama pembangunan peternakan dan kesehatan hewan untuk menopang pelaksanaan sistem agribisnis peternakan dan sistem kesehatan hewan nasional.
3) Terbatasnya modal pelaku utama pembangunan peternakan dan kesehatan hewan serta pada sisi lain fasilitas kredit dari lembaga keuangan sulit diperoleh.
4) Sistem pemasaran ternak belum efisien dan belum berkeadilan sehingga belum mampu mendorong semangat untuk berwirausaha peternakan.
5) Belum tersedianya bibit ternak ruminansia yang cukup, baik kuantitas maupun kualitas.
6) Di beberapa kabupaten dan kota, iklim berusaha belum kondusif.

7) Masih adanya ancaman penyakit baik yang sifatnya endemis dan merugikan (SE, Hog cholera, PRRS) maupun penyakit zoonosis (flu burung, flu babi, anthrax, brucellosis, rabies, salmnonellosis, leptospirosis).
8) Masih tingginya pemotongan ternak betina produktif.
9) Belum terjaminnya pangan hewan yang ASUH, karena adanya unsur kesengajaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, seperti adanya daging illegal, pencampuran daging, penambahan bahan pengawet dan lain-lain.
10) Rapuhnya koordinasi, baik secara vertikal, horizontal dan koordinasi antara struktural dan fungsional baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa.

Potensi pendukung pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Sumatera Utara sangat besar dan beragam, namun sampai dengan saat ini potensi tersebut baru sebagian kecil saja yang dimanfaatkan. Walaupun disadari bahwa potensi dimaksud bukanlah potensi riil peternakan, tetapi adalah potensi sektor dan sub sektor terkait yang dapat diintegrasikan dengan peternakan dalam prinsip saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Beberapa potensi dimaksud adalah sebagai berikut;
1) Padang rumput berupa alang-alang masih terdapat ± 1.311.159 Ha. yang tersebar diberbagai kabupaten/ kota di Sumatera Utara.
2) Perkebunan yang menghasilkan limbah, baik limbah segar maupun limbah olahan merupakan sumber pakan potensial. Dari luas perkebunan kelapa sawit, kakao dan tebu di Sumatera Utara masing-masing 1.119.400 Ha, 70.797 Ha dan 17.767 Ha menurut perhitungan Departemen Peternakan Universitas Sumatera Utara memiliki daya dukung untuk ±1.200.000 ST ternak ruminansia.
3) Limbah tanaman pangan dan hortikultura (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, tanaman sayuran dan buah-buahan) memiliki daya dukung 1.037.750 ST ternak ruminansia.
4) Peluang dan pangsa pasar ternak dan hasil-hasilnya cukup besar, baik pasar domestik, regional maupun ekspor. Peluang ekspor yang sampai saat ini belum dapat terpenuhi oleh Sumatera Utara adalah ternak kambing dan domba ke Timur Tengah dan Malaysia, ternak babi ke Singapura serta produk olahan ayam ke Jepang.
5) Sumber ilmu pengetahuan dan teknologi di Sumatera Utara cukup tersedia seperti Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta, BPTP, BPPV, Loka Penelitian Kambing Potong Sei Putih, dan BPTU Siborong-borong.
6) Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya menerapkan pendekatan sistem agribisnis peternakan dan sistem kesehatan hewan nasional, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan maupun undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan. Hal ini di sebabkan oleh banyak faktor terutama para pelaku utama peternakan dan kesehatan hewan di daerah ini sebagian besar adalah peternak rakyat / peternak kecil yang sarat dengan kelemahan-kelemahan dan keterbatasan-keterbatasan. Di samping itu seperti telah diuraikan terdahulu, bahwa potensi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang sangat besar

dan beragam di Sumatera Utara, masih sebagian kecil saja yang sudah dapat dimanfaatkan, sedang sebagian besar lagi masih menunggu uluran tangan para pelaku-pelaku yang kreatif dan dinamis.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2013-1018 adalah "*Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara yang Sejahtera*". Makna atas pernyataan visi tersebut adalah a) Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan; b) Menjadi, bermakna melakukan upaya pembangunan menuju ke arah yang lebih baik; c) Provinsi, bermakna pemerintah daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk membina dan mengkoordinasikan pemerintah kabupaten/kota; d) Berdaya saing, bermakna kondisi perekonomian dan sosial pemasyarakatan di atas capaian nasional yang berdaya saing dan menuju terbaik. d) Sejahtera, bermakna masyarakat Sumatera Utara memiliki pendapatan per kapita riil yang lebih baik dari nasional dan menurunkan kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat.

Visi tersebut di atas dicapai melalui 5 misi yang meliputi 1) Membangun sumberdaya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religious, dan berkompetensi tinggi; 2) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional, dan internasional; 3) Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan, dan keadilan serta mengurangi ketimpangan daerah; 4) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; 5) Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih good governance dan clean government.

Misi 1 adalah menciptakan sumberdaya manusia yang berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berkompetensi tinggi (pengamalan IMTAQ dan penguasaan IPTEK). Misi ini bermakna bahwa arah kebijakan pembangunan ke depan difokuskan pada penciptaan suasana kehidupan internal dan antar umat yang saling menghormati dan mencegah konflik antar umat beragama, serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu melalui misi ini diharapkan tercipta manusia yang sehat jasmani dan rohaninya serta terbangunnya karakter yang berdaya saing melalui pendidikan yang berkualitas dan berkompetensi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.

Misi 2 adalah membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah melalui kerjasama antar daerah, kerjasama dengan swasta, kerjasama regional, dan kerjasama internasional. Misi ini bermakna bahwa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan

pembangunan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan ke depan difokuskan kepada pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi, menghimpun dan menggerakan semua potensi yang ada di masyarakat. Selain itu, pembangunan dilakukan dengan menggalang kerjasama antar daerah, kerjasama antara pemerintah dengan swasta, kerjasama regional dan internasional, pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah pada kawasan cepat tumbuh dan kawasan ekonomi khusus.

Misi 3 adalah meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah. Pernyataan misi ini bermakna bahwa untuk menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat dalam rangka peningkatan kenyamanan sesuai standar hidup layak, setara, dan berkeadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, maka arah kebijakan Pembangunan kedepan difokuskan kepada peningkatan pelayanan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, transportasi, perhubungan, pengairan, air minum dan sanitasi, ketenaga listrikan, telematika, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Misi 4 adalah membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi. Misi ini bermakna bahwa untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah, maka arah kebijakan pembangunan ke depan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumberdaya alam terbarukan, menciptakan sumberdaya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan produksi untuk penguatan system ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat petani/nelayan, serta penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan industri dan perdagangan.

Misi 5 adalah pembinaan pemerintahan yang professional dan berkompetensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten dengan dukungan system kepemerintahan yang baik (*Good Governance*). Misi ini bermakna bahwa untuk menunjang pembinaan aparatur Negara yang professional dan berkompetensi, serta mendorong penegakan hukum yang konsisten, maka arah kebijakan pembangunan ke depan diarahkan kepada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

Prioritas pembangunan yang pertama dalam Misi-1 berupa peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan diarahkan untuk membentuk karakter SDM yang diwarnai oleh IPTEK dan IMTAQ yang berdaya saing. Kebijakan umum dalam pencapaian hal ini ada tujuh meliputi 1) Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan untuk pencapaian wajar pendidikan 12 tahun; 2) Peningkatan partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan; 3) Pemenuhan kualifikasi pendidikan guru S2/S1/D-IV; 4) Sertifikasi Guru; 5) Peningkatan insentif Guru; 6) Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda; 7) Meningkatkan seni budaya dan prestasi olahraga di tingkat local, nasional, dan regional. SKPD pelaksana untuk implementasi kebijakan umum ini adalah Dinas Pendidikan, Badan Perpustakaan dan Arsip, dan Dinas Pemuda dan

Olahraga. Lembaga pendukung meliputi Dewan Pendidikan, Kementrian Agama, Organisasi Masyarakat Keagamaan, Organisasi Kepemudaan, dan KONI Sumut.

Prioritas pembangunan yang kedua dalam Misi-1 berupa peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat dalam mendukung daya saing SDM. Kebijakan umum dalam pencapaian hal tersebut adalah 1) Pembangunan sarana/prasarana kesehatan untuk pencapaian indeks kesehatan yang baik; dan 2) Peningkatan cakupan layanan kesehatan (universal coverage) melalui Jamkesda, dan Jampersal. SKPD pelaksana dari kebijakan umum ini adalah Dinas Kesehatan, RSJ daerah, Rumah Sakit Haji, dengan didukung oleh Orkemas Kesehatan, RS Swasta, dan JBHC.

Prioritas pembangunan yang ke-3 dalam Misi-1 berupa peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan, penerapan teknologi, inovasi dan kreativitas daerah diarahkan untuk menggunakan hasil riset untuk optimalisasi pemanfaatan SDA dan daya saing SDM. Kebijakan umum dalam pencapaian hal tersebut ada dua yaitu 1) Pengembangan riset Teknologi Tepat Guna (TTG); dan 2) Research and development (R&D) mendukung pengembangan kawasan strategis, kawasan andalan, dan kawasan ekonomi khusus melalui kerjasama R&D dengan Perguruan Tinggi dalam/luar negeri dan lembaga riset lainnya melalui pemberdayaan Dewan Riset Daerah (DRD). SKPD pelaksana dari kebijakan umum ini adalah Badan Litbang Daerah (Balitbangda) dengan didukung oleh PTN/PTS, Lembaga Riset, dan DRD.

Prioritas pembangunan ke-4 ada didalam Misi-2 yaitu peningkatan infrastruktur, pengembangan wilayah, mitigasi bencana, dan pelestarian lingkungan hidup mendukung daya saing perekonomian, diarahkan untuk mewujudkan infrastruktur yang berdaya saing dalam meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kebijakan umum untuk mendapatkan hal tersebut ada delapan mencakup 1) Peningkatan daya dukung kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan untuk mencapai kondisi yang mantap; 2) Peningkatan aksesibiltas wilayah pedesaan dan sentra produksi, wilayah perbatasan, terpencil maupun kepulauan serta wilayah perkotaan untuk efisiensi dan stabilisasi harga; 3) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan air baku; 4) Peningkatan rasio elektrifikasi; 5) Kapasitas daya listrik terpasang; 6) Rumah tangga penguna air bersih; 7) Rehabilitasi rumah layak huni; dan 8) Mitigasi bencana. SKPD pelaksana dalam implementasi kebijakan umum tersebut adalah Bina Marga, PSDA, Dishub, Distarukim, Badan Lingkungan Hidup, Distamben, dan BPBD. SKPD tersebut didukung oleh kerjasamanya dengan pihak swasta terkait (Public and Private Partnership).

Prioritas pembangunan ke-5 juga ada dalam Misi-2 yaitu peningkatan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing. Kebijakan umum untuk mendapatkan hal tersebut ada enam mencakup 1) Peningkatan produktivitas koperasi dan UKM dengan target pertumbuhan 10-15%/tahun; 2) Peningkatan penyerapan tenaga kerja per unit koperasi dan UKM dengan target pertumbuhan 10%/tahun; 3) Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk koperasi untuk tujuan ekspor pada 30 koperasi dan UKM; 4) Terbinanya UMKM dalam sentra industry kecil yang mencakup 300 UMKM; 5) Peningkatan pengelolaan destinasi pemasaran dan SDM Pariwisata pada 3 destinasi wisata utama (Danau

Toba, Nias, dan Berastagi) dan terlatihnya 100 orang petugas parawisata; dan 6) Peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 10%. SKPD pelaksana dalam implementasi kebijakan umu tersebut meliputi Diskop dan UKM, Disperindag, dan Disbudpar, yang didukung oleh Perusahaan BUMN/BUMD, Lembaga Keuangan, dan Perusahaan swasta lainnya.

Prioritas pembangunan ke-6 ada dalam Misi-3 yaitu perluasan kesempatan kerja dan peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran yang diarahkan untuk mewujudkan penurunan angka kemiskinan dan pengggangguran. Kebijakan umum untuk mendapatkan hal tersebut ada 3 meliputi 1) Penurunan angka pengangguran terbuka; 2) Penurunan persentase penduduk miskin; 3) Penciptaan kesempatan kerja baru melalui optimalisasi rumah produktivitas daerah bagi sarjana yang belum berkerja yaitu sekitar 1.000 sarjana, dan mendorong terciptanya sekitar 60.000 pengusaha pemula. SKPD pelaksana dalam implementasi kebijakan umum tersebut mencakup Disnakertrans, Dinkessos, Bapemmas, Pendes, yang didukung oleh Perusahaan yang memiliki fasilitas pelatihan dan magang, serta mendapatkan pembiayaan skim kredit mikro bunga rendah dengan system perguliran.

Prioritas pembangunan ke-7 ada dalam Misi-4 yaitu peningkatan produksi, produktivitas, dan daya saing produk pertanian, kelautan, dan perikanan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian, kelautan, dan perikanan. Kebijakan umum untuk mendapatkan hal tersebut ada 5 yaitu 1) Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan pada beras, jagung, kedele, dan daging sapi; 2) Peningkatan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan untuk pencapaian Pola Pangan Harapan; 3) Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor komoditi perkebunan, hortikultura; 4) Peningkatan kesejahteraan petani, peternak, pekebun, dan nelayan dalam bentuk peningkatan nilai tukar petani (NTP); 5) Terpeliharanya hutan dan penanganan lahan kritis. SKPD pelaksana dalam implementasi kebijakan umum tersebut adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikulutu, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan. Dukungan diharapkan dari perusahaan agribisnis dan agroindustri.

Prioritas pembangunan ke-8 ada dalam Misi-5 yaitu peningkatan kehidupan beragama, penegakan hukum, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Government. Kebijakan umum untuk mendapatkan hal tersebut ada 13 meliputi 1) Peningkatan kehidupan beragama dan keharmonisan antar umat beragama melalui pemberdayaan lembaga organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya, dan perbaikan rumah ibadah sekitar 1.000 unit; 2) Peningkatan pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan terjaganya harmonisasi dalam masyarakat; 3) Peningkatan iklim perpolitikan yang kondusif; 4) Peningkatan Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintah daerah; 5) Terciptanya persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan, dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan hokum; 6) Terwujudnya iklim berusaha yang baik dalam mendukung daya saing daerah; 7) Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan; 8) Perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan; 9) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; 10) Peningkatan kualitas

dan kuantitas perencanaan pembangunan; 11) Terwujudnya system informasi perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi; 12) Terwujudnya koordinasi dan sinergitas dalam perencanaan pembangunan daerah; 13) Peningkatan kerjasama antar daerah, kerjasama luar negeri, dan dengan swasta. SKPD pelaksana dalam implementasi kebijakan umum tersebut meliputi KDH/Wakil KDH, DPRD, Sekretariat Daerah (+11 Biro), Bappeda, BPPT, BPMP, Bakesbangpol, Satpol PP, Diskominfo, KPID, Sekr. KORPRI, Sekr. DPRD SU, Kantor Penghubung, BKD, Badiklat, Inspektorat, Dispenda, dan didukung oleh seluruh stakeholders yang berkepentingan dan memeiliki kepedulian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Prioritas pembangunan ke-9 juga ada dalam Misi-5 yaitu mendukung dan mendorong kebijakan nasional di daerah (MP3KI, MP3EI, RAD-MDGs, RAD-PG, RAD-PK, RAD-GRK) untuk menjamin adanya sinergitas pembangunan daerah dengan sasaran/tujuan pembangunan nasional. Kebijakan umum untuk mencapai tujuan tersebut ada 8 meliputi 1) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan MP3KI dengan tujuan mencapai keberhasilan yang relative cepat (quick wins) di lokasi yang ditentukan; 2) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran MP3EI yang difokuskan pada terfasilitasinya KEK Sei Mangke Kabupaten Simalungun dan sekitarnya; 3) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran RAD-MDGs yang mencakup 7 sasaran yaitu a) kemiskinan dan kelaparan, b) pendidikan dasar, c) kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, d) angka kematian anak, e) kesehatan ibu, f) penanganan HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, g) kelestarian lingkungan; 4) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran RAD-PG yang mencakup 3 sasaran yaitu a) angka kebutuhan energy mnimal 2.200 kkal/kap/hari, b) prevalensi gizi buruk pada balita, c) prevalensi ukuran tubuh pendek pada balita; 5) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RAD-GRK; 6) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RAD-PK; 7) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RAD-PUG; dan 8) Mendukung sasaran pembangunan lainnya. SKPD pelaksana dalam implementasi kebijakan umum tersebut adalah seluruh SKPD yang terkait dan dilaksanakan secara lintas SKPD.

Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Misi-ke 5 yaitu Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Tabel. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahz

Visi : MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA SEJAHTERA				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 5 : Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelenjutan dan			

	berwawasan lingkungan			
1	Program peningkatan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan.	• Koordinasi yang belum optimal. • SDM belum memadai.	Desentralisasi	Potensi SDA tinggi
2	Program peningkatan kesejahteraan petani.	• Wilayah kerja cukup luas • SDM belum memadai.	Keterbatasan sarana dan prasarana	Elastisitas Permintaan produk ternak tinggi
3	Program pengembangan agribisnis.	• Skala usaha peternakan kecil • SDM belum memadai.	Terbatasnya permodalan	Tersedianya skim kredit bunga ringan
4	Program peningkatan produksi hasil peternakan.	• Rendahnya produktivitas ternak. • SDM belum memadai.	• Rendahnya kualitas bibit. • Terbatasnya pakan. • Ancaman PHMS.	Tersedianya teknologi pendukung
5	Program peningkatan pemanfaatan teknologi.	• Rendahnya tingkat penerapan teknologi • SDM belum memadai.	• Belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan.	Tersedianya teknologi teruji.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Visi Badan Ketahanan Pangan Pusat Kementerian Pertanian tahun 2010 – 2014 adalah " Menjadi institusi yang handal, aspiratif, dan inovatif dalam pemantapan ketahanan pangan " untuk mencapai visi diatas, Badan Ketahanan Pangan Pusat mengemban misi : a). Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan; b) Pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat, daerah dan nasional; c) Pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan daerah; d). Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, dan pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya .

Tujuan Pembangunan Ketahanan Pangan yang tertuang pada renstra K/L adalah ; Memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dikuasai untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan melalui ; a) Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki/ dikuasainya b). Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan c). Mengembangkan system distribusi, harga dan akses pangan d). Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi beras. e). Mengembangkan system penanganan keamanan pangan segar.

Komparasi capaian sasaran Renstra SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Sumatera Utara terhadap Renstra SKPD Kabupaten/Kota tidak dapat ditampilkan karena tidak tersedianya capaian sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota (Tabel 2.2).

Komparasi terhadap capaian sasaran Renstra K/L pada tahun 2013 menunjukkan bahwa untuk populasi ternak telah tercapai bahkan dilampaui, kecuali ternak itik (69,8%) dan ayam buras (98,3%). Sama halnya dengan populasi ternak, maka produksi daging dari berbagai komoditas juga telah mencapai sasaran, kecuali daging

ayam buras (68%), itik (71,3%), kambing (94,7%), dan domba (97,5%). Untuk produksi telur, sasaran K/L telah dilampaui (129,2%), dan untuk produksi susu masih sangat jauh dibawah sasaran Renstra K/L (44,9%).

Komparasi terhadap capaian sasaran Renstra K/L pada tahun 2013 menunjukkan bahwa untuk populasi ternak telah tercapai bahkan dilampaui, kecuali ternak itik (69,8%) dan ayam buras (98,3%). Sama halnya dengan populasi ternak, maka produksi daging dari berbagai komoditas juga telah mencapai sasaran, kecuali daging ayam buras (68%), itik (71,3%), kambing (94,7%), dan domba (97,5%). Untuk produksi telur, sasaran K/L telah dilampaui (129,2%), dan untuk produksi susu masih sangat jauh dibawah sasaran Renstra K/L (44,9%).

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Pengembangan Pola Kawasan Budidaya. Arahan pola pemanfaatan ruang baik ruang darat maupun ruang laut untuk kegiatan budidaya mencakup arahan pemanfaatan kawasan hutan produksi, kawasan hutan tanaman rakyat, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan perikanan dan kelautan, kawasan peternakan, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan industri, kawasan permukiman dan kawasan peruntukan budidaya lainnya.

Penentuan bagi arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya didasarkan pada pertimbangan berikut :

3. Kesesuaian lahan, yang merupakan hasil penilaian terhadap kemampuan atau daya dukung lahan terhadap kegiatan penggunaan lahan tertentu.
4. Potensi pengembangan dan kegiatan budidaya, yang merupakan hasil penilaian ekonomi dan keruangan terhadap potensi pengembangan budidaya tertentu.

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Peternakan. Budidaya kawasan peternakan terdiri atas budidaya peternakan besar dan peternakan kecil/unggas. Lokasi kegiatan peternakan diarahkan sesuai dengan lokasi kegiatan pertanian pada lahan kering, maupun perkebunan.

Rencana pengembangan jenis ternak besar potensial dilakukan di Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Toba Samosir, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Labuhan Batu, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal dan Kepulauan Nias, Nias Utara, Nias Barat, dan Nias Selatan.

Pengembangan kawasan budidaya peternakan hewan kecil dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perternakan hewan kecil meliputi seluruh kabupaten kota.

Faktor pendorong yang diperkirakan akan mempengaruhi kecenderungan masa depan adalah belum ada kawasan peternakan yang terpadu dengan fasilitas pembangkit listrik tenaga bio gas. Perkiraan dampak negatif dan positif dari faktor

pendorong terhadap kecenderungan masa depan adalah sulit mengembangkan energi listrik tenaga biomassa akibat kawasan peternakan yang tidak direncanakan secara terpadu dengan pembangkit listrik.

Dampak negatif peningkatan produksi hasil peternakan diikuti dengan pertumbuhan jumlah ternak yang berimplikasi pada kotoran ternak sehingga berdampak negatif terhadap pencemaran air tanah dan pencemaran Udara serta berpotensi terhadapi alih fungsi lahan khususnya yang berfungsi lindung akan terjadi terutama pada peternakan rakyat yang melepaskan ternaknya untuk memenuhi pakannya sendiri**.**

Mitigasi. Pengelolaan kotoran ternak menjadi biogas serta pengelolaan limbah cair peternakan dengan teknologi lingkungan tepat guna terutama pada kelompok-kelompok peternakan rakyat, serta pengembangan industri pakan ternak yang terjangkau peternakan rakyat.

Rekomendasi. dalam peta Pola ruang RTRW Kab/kota pemanfaatan ruang bagi lokasi peternakan secara eksplisit sebaiknya sudah diplotkan sebagai deliniasi kawasan budidaya.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh isu strategis baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu, perlu diketahui dan difahami isu apa saja yang saat ini muncul di tingkat nasional maupun internasional (Tabel 3.3).

Isu strategis internasional. Di tingkat internasional saat ini terdapat 4 isu penting yang perlu difahami yaitu 1) Komitmen pencapaian pembangunan millenium (MDGs) yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 1990; 2) Meningkatnya kerjasama ekonomi antar Negara yang ditandai dengan lahirnya Forum Kerjasama Regional dalam bidang ekonomi seperti APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation)*, EEC (*European Economic Community*), ASEAN (*Assosciation of Southeast Asian Nations*), AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), ACFA (*Advisory Committee on Fisheries and Aquaculture*), G-8 (*Group of Eight : Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, Amerika Serikat [G6, 1975], Kanada [G7, 1976]* dan *Rusia [tidak ikut dalam seluruh acara]*, serta *Uni Eropa*), dan lain sebagainya;

Tabel. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Komitmen pencapaian pembangunan Millenium (MDG's) yang ditetapkan pada UN Summit tahun 1990 oleh PBB;	Desentralisasi dan otonomi daerah yang diinterpretasi secara berbeda dan tidak terkontrol menjadi penghambat daya saing perekonomian daerah;	Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam lokal;	Daya saing produk peternakan masih rendah
2	Meningkatnya kerjasama ekonomi antar negara yang	Banyaknya peraturan perundang-undangan	Optimalisasi penanggulangan	Impor produk peternakan

	ditandai dengan lahirnya Forum Kerjasama Regional dalam bidang ekonomi seperti APEC, EEC, ASEAN, AFTA, ACFA, G-8 dan lain sebagainya;	yang kurang tegas dan tidakmemilikipetunjukpelaksanaanmengakibatkansering menimbulkan multitafsir sehingga menyulitkan bagi aparat pemerintahan di daerah untuk membuat keputusan;	kemiskinan dan penanganan pengangguran;	masih tinggi
3	Timbulnya kesadaran masyarakat dunia dalam menjaga dan memelihara planet bumi karena ada indikasi telah terjadinya degradasi lingkungan yang berdampak kepada pemanasan global (*Global Warming*) yang menimbulkan perubahan iklim yang ekstrim di berbagai belahan bumi.	Isu Lingkungan hidup, dengan meningkatnya pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup yang diakibatkan tuntutan pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah yang tidakberbasislingkungan;	Penurunan kualitas lingkungan hidup dan kesiapan menghadapi ancaman bencana alam (mitigasi bencana)	Pengembangan kawasan peternakan sangat mendesak
4		Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Sumatera Utara.	Peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah untuk meningkatkan modal.	Peningkatan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
5				Skim kredit bunga ringan dengan prosedur mudah
6				Peningkatan produktivitas dan nilai tambah peternakan

3) Menguatnya penghormatan terhadap HAM (hak azazi manusia) yang terlalu menonjolkan hak-hak individu sehingga dapat mengorbankan hak-hak masyarakat secara umum; 4) Timbulnya kesadaran masyarakat dunia dalam menjaga dan memelihara planet bumi karena ada indikasi telah terjadi degradasi lingkungan yang berdampak kepada pemanasan global (*global warming*) yang menimbulkan perubahan iklim yang ekstrim di berbagai belahan bumi.

Isu strategis nasional. Dalam mengantisipasi isu internasional, maka terdapat 5 isu strategis nasional yang perlu difahami yaitu 1) Desentralisasi dan otonomi daerah yang difahami secara berbeda dan tidak terkendali dan menjadi penghambat daya saing perekonomian daerah; 2) Banyaknya peraturan perundang-undangan yang kurang tegas dan tidak memiliki petunjuk pelaksanaan yang mengakibatkan sering terjadinya multitafsir sehingga menyulitkan bagi aparat pemerintahan di daerah untuk membuat keputusan; 3) Isu HAM yang ditandai dengan dibentuknya beberapa lembaga yang menangani HAM; 4) Isu lingkungan hidup, dengan meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan tuntutan pemenuhan

kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah yang tidak berbasis lingkungan; 5) Percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia melalui Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor ekonomi yang telah menetapkan Sumatera sebagai "Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional" dan khusus untuk Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan beberapa proyek skala besar (Mega Project) untuk mendukung program MP3EI pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang telah ditetapkan sebagai KEK pertama di Indonesia (PP 29/2012).

Isu Strategis Provinsi. Sejalan dengan pengaruh dari isu strategis internasional dan nasional, maka terdapat 13 isu strategis provinsi Sumatera Utara. Isu strategis tersebut meliputi 1) Masih belum meratanya jangkauan pelayanan dan mutu pelayanan dasar pendidikan, serta belum optimalnya cakupan layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran di pusat-pusat pendidikan di daerah khususnya di pedesaan, kawasan tertinggal, kawasan terpencil, dan kawasan perbatasan; 2) Masih belum optimalnya cakupan layanan kesehatan dasar dan kualitas pelayanan kesehatan pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat di daerah; 3) Belum optimalnya cakupan layanan kesejahteraan social dan kinerja pelayanan social; 4) Masih adanya desa tertinggal dengan kondisi terbatasnya infrastruktur, akses pendidikan, akses kesehatan, perekonomian masyarakat serta kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat yang masih belum berkembang; 5) Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dan penanganan pengangguran; 6) Belum optimalnya pengembangan sektor dan komoditi unggulan berbasis sumberdaya alam lokal; 7) Belum optimalnya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan infrastruktur dasar berupa sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, pengairan, transportasi, perumahan/pemukiman, air bersih, ketenaga listrikan, dan sanitasi lingkungan; 8) Masih diperlukan pengurangan kesenjangan antara wilayah baik dari segi ekonomi maupun sosial; 9) Masih rendahnya perkembangan jumlah dan usaha koperasi dan UKM sebagai dasar penguatan struktur dan fundamental perekonomian di daerah; 10) Penurunan kualitas lingkungan hidup dan kesiapan menghadapi bencana alam (mitigasi bencana); 11) Optimalisasi penyelenggaraan tata pemerintahan, otonomi daerah, penegakan supremasi hukum dan HAM, serta ketentraman dan ketertiban; 12) Masih banyaknya infrastruktur strategis yang perlu dibangun dan dikembangkan untuk membuka keterisolasian, dan percepatan pembangunan pada kawasan tertinggal, kawasan terpencil, dan kawasan perbatasan; 13) Keterbatasan sumber pendanaan pembangunan yang harus didukung dengan investasi pihak swasta dan mencari sumber-sumber pendanaan lainnya serta optimalisasi dan efisiensi melalui peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan sub-sektor peternakan di Sumatera Utara utamanya berkaitan dengan belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam, masih rendahnya daya saing ekonomi kerakyatan, dan masih rendahnya pemanfaatan hasil R&D dalam usha peternakan. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam terlihat dari masih rendahnya daya saing sub-sektor peternakan baik dalam kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri. Selain itu, permasalahan inipun berkaitan dengan tingkat kesejahteraan petani peternak yang belum memenuhi standar hidup layak, masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti jalan

usaha tani dan pusat pemasaran produk, masih lemahnya kelembagaan petani peternak dan penyuluh di bidang peternakan, belum optimalnya penerapan teknologi, sarana informasi dan komunikasi, serta adanya ancaman kerusakan lingkungan akibat tata laksana peternakan yang kurang tepat.

Daya saing ekonomi kerakyatan yang masih rendah berkaitan dengan belum optimalnya fungsi kelembagaan koperasi dan UKM di bidang peternakan, dan belum optimalnya pengembangan kluster industri untuk mendukung hilirasi produk primer peternakan. Oleh karena itu, upaya pembentukan koperasi dan perusahaan pemula dengan menggandeng lembaga terkait harus dilakukan sehingga mampu menciptakan daya ungkit meningkatkan daya saing produk peternakan. Selain itu, pewilayahan komoditas peternakan unggulan perlu dilakukan dan diisi oleh industri hilirnya sehingga dapat mendorong berkembangnya industri primer yang diperlukan untuk memasok bahan bakunya.

Pembangunan subsektor peternakan perlu didukung oleh meningkatnya penerapan inovasi teknologi hasil R&D. Inovasi teknologi yang dipilih sebaiknya memenuhi kriteria sederhana, murah, efektif, dan ramah lingkungan. Untuk itu diperlukan uji adaptasi terhadap kondisi biofisik dan sosial budaya sebelum dianjurkan untuk dipakai secara masal. Lembaga R&D seperti Balitbangda, BPTP, PTN dan PTS, dan Perusahaan Swasta sebaiknya berkerjasama untuk menghasilkan inovasi teknologi spesifik lokasi yang tentunya sesuai untuk diterapkan di setiap kawasan industri peternakan di provinsi ini. Masalisasi penerapan teknologi diharapkan dikoordinasikan oleh Bakor Penyuluhan Provinsi dan Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota berkerjasama dengan Dinas PKH Provinsi/Kabupaten/Kota. Peneliti dari lembaga R&D penghasil teknologi dapat digunakan sebagai narasumber dalam kegiatan pelatihan, dan juga melakukan pengawalan sehingga produktivitas yang dihasilkan tidak terlalu jauh menyimpang dari hasil penelitian/pengkajian.

Yang menjadi isu strategis dalam pembangunan ketahanan pangan selama tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian pangan dengan menekankan pada 5 (lima) komoditas strategis (padi, jagung, kedelai, gula dan daging sapi)
2. Sistem cadangan pangan dan distribusi harga pangan
3. Penanganan kerawanan pangan dan kerentanan pangan sebagai tindak lanjut diluncurkannya peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan nasional
4, Stabilitas dan keterjangkauan harga, baik pada tingkat produsen maupun konsumen
5. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya pangan lokal untuk penguatan pola pangan harapan (PPH)
6. Monitoring system ketahanan pangan sebagai basis early warning system.
   Penjelasan Issu-issu strategi Pembangunan Ketahanan Pangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Strategi dan Kebijakan Sumatera Utara dalam Sub Sistem Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Berbagai Strategi dan Kebijakan Sumatera Utara yang dilakukan selama ini antara lain:

- Tersedianya keanekaragaman produk pangan olahan dan Peningkatan kemampuan produksi bahan pangan hewani melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada dengan melaksanakan 4 (empat) usaha pokok yaitu : Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi dan Rehabilitasi dengan dukungan sepenuhnya dari kredit program sehingga ketersediaan bahan pangan dapat terpenuhi.
- Peningkatan keberdayaan masyarakat miskin yang berada dalam kondisi kelaparan serta pengembangan jaringan pengaman pangan bagi kelompok rawan pangan transien karena bencana alam dan sosial.

Strategi dan kebijakan Sumatera Utara selama ini khususnya untuk meningkatkan ketersediaan pangan sebagai berikut :

1. Mendorong Peningkatan Produktivitas melalui Inovasi Teknologi Baru

   Untuk mendorong peningkatan produktivitas dilakukan pengwilayahan sesuai kondisi daerah, tingkat penerapan teknologi, serta kesiapan sarana prasarana pendukung. Untuk daerah – daerah yang tingkat produktivitasnya masih rendah didorong untuk mempercepat terjadinya peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi spesifik lokasi ataupun integrasi terpadu ternak dengan tanaman pangan disertai dengan pengembangan rekayasa sosial dan rekayasa ekonomi.

   Untuk mendukung percepatan proses, adopsi inovasi teknologi baru, dilakukan revitalisasi lembaga penyuluhan melalui peningkatan kapasitas unit kerja lingkup tanaman pangan dan hortikultura di provinsi dan kabupaten.

   Peningkatan produksi padi sangat dibutuhkan dalam rangka swasembada tahun 2015 serta mengantisipasi berkurangnya luas tanam padi, selain itu juga dilakukan gerakan peningkatan penggunaan benih bermutu serta sarana produksi di lokasi yang telah ditetapkan.

2. Cadangan pangan

   Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran penanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa) memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik. Saat ini sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi minimal 3 (tiga) bulan ke depan. Selain itu, juga ditingkatkan cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya.

3. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis lingkungan

   Strategi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dilakukan melalui

   a. Kebijakan pengembangan ekonomi pertanian rakyat dan usaha mikro kecil dan menengah yang berdaya saing melalui pengembangan kawasan, ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis, mempertahankan

swasembada beras, dan intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pangan dan hortikultura selain padi.

b. Peningkatan promosi sektor – sektor pangan dan olahannya sebagai unggulan setiap kabupaten/kota.

c. Pengembangan RPL dan tepungisasi

d. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya dan potensi daerah melalui perencanaan pembangunan yang terdiri atas peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan pangan, pemyempurnaan dan pengembangan data dan statistik pangan berbasis teknologi informasi dan peningkatan kerjasama perencanaan pembangunan pangan antar daerah.

4. Meningkatkan Akses Petani terhadap Sumberdaya, Modal Teknologi dan Pasar

Upaya – upaya untuk peningkatan akses petani terhadap air terus dilakukan, bukan hanya dari aspek kontinuitas dan ketetapan waktu sesuai kebutuhan tanaman. Persaingan penggunaan air (irigasi) dengan sektor lain seperti perumahan dan industri diatur dan diawasi secara ketat agar pasokan bagi usaha tani tidak terkalahkan. Modal juga merupakan kendala yang serius dalam ketersediaan dan distribusi sumber tanaman pangan dan hortikultura. Oleh karena itu untuk meningkatkan akses petani terhadap sumber permodalan dilakukan berbagai dukungan seperti kredit perbankan, modal venture, dan kemitraan dengan swasta. Modal usaha yang telah disediakan pemerintah melalui dana bergulir akan terus ditingkatkan pengembangannya termasuk *sejenis* PLDPM, perluasan LUEP, PMUK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi terus ditingkatkan melalui percontohan, pelatihan, magang, penyuluhan, gelar teknologi dan penyebaran informasi teknologi, baik dari lembaga penelitian pemerintah, swasta maupun teknologi yang dihasilkan petani sendiri.

Peningkatan akses petani terhadap pasar antara lain:

- Rantai pasok, jejaring logistik
- Penyediaan informasi pasar
- Informasi harga
- Perbaikan sistem tata niaga
- Penumbuhan pusat – pusat promosi
- Fasilitasi penyediaan terminal/sub terminal agribisnis
- Penumbuhan koperasi
- Kemitraan dengan swasta
- Penguatan kelembagaan pemasaran
- Sistem resi Pergudangan dan cadangan pangan

5. Mendorong Sinergis Subsistem Agribisnis Pangan

Keberhasilan pengembangan sistem dan usaha agribisnis tanaman pangan khususnya umbi-umbian dan hortikultura-sayur dan buah sangat tergantung pada

keterpaduan secara utuh antar subsistem (sarana prasarana, on farm, pengolahan dan pemasaran hasil, serta penunjang). Integrasi antara subsistem agribisnis tersebut terus didorong dengan memperhatikan aspek pembiayaan.

6. Mendorong Diversifikasi Produksi

   Dalam rangka mengantisipasi keragaman permintaan pasar untuk keberhasilan konsumsi pangan beragam, bergizi dan berimbang, dilakukan upaya diversifikasi produksi tanaman pangan sesuai keunggulan komparatif wilayah berbasiskan budaya lokal dan keamanan pangan melalui pelaksanaan GAP dan SOP. Upaya ini selain berdampak terhadap peluang pemanfaatan keragaman potensi ekologi, juga memperluas kesempatan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha agribisnis

7. Mendorong Partisipasi Aktif seluruh Stakeholder

   Penetapan perumusan kebijakan secara bersama-sama dengan pemerintah pusat yakni norma, standard dan prosedur sangat diperlukan. Oleh karena itu pembangunan ketahanan pangan di Sumatera Utara dirancang untuk lebih berkembangnya inisiatif masyarakat dan seluruh stakeholder selain dengan adanya UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah daerah perlu lebih didorong kapasitas dan potensinya untuk membangun ketahanan pangan didaerahnya.

8. Pemberdayaan Petani dan Masyarakat

   Prioritas pembangunan diarahkan pada pemberdayaan petani dan masyarakat sehingga mereka mampu mengelola dan mengembangkan usahataninya secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan upaya – upaya peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan melalui pendidikan/pelatihan, penguatan sarana kerja, dan pemanfaatan pola dan manajemen pembangunan ketahanan pangan.

Strategi dan Kebijakan dalam Sub Sistem Distribusi dan Akses Pangan

Untuk Distribusi dan akses pangan di Sumatera Utara, strategi dan kebijakan yang telah dilaksanakan adalah melalui:

- Peningkatan efisiensi dan kelancaran distribusi bahan pangan melalui reformasi berbagai peraturan yang menghambat lalu lintas perdagangan, pengembangan sarana dan prasarana distribusi serta pelayanan teknologi pasca panen-sarana dan prasarana pasca panen, pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah
- Sistem informasi pasar dan lembaga pemasaran daerah.
- Peningkatan kemampuan masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menstabilkan harga bahan pangan antar waktu maupun antar wilayah. Penjaminan Stabilitas Harga Pangan di Sumatera Utara (padi, jagung, kedelai-on going) terus dilakukan karena: masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehigga harga bisa tinggi pada masa panen dan rendah pada waktu paceklik; harga

pangan dunia semakin tidak menentu dan indonesa sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat

Strategi dan Kebijakan dalam Sub Sistem Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan

Berbagai strategi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal konsumsi, mutu dan keamanan pangan antara lain:

a) Penurunan konsumsi beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat sebesar 1.5 persen per tahun melalui diversifikasi konsumsi dan manggadong.
b) Peningkatan Penganekaragaman konsumsi bahan pangan yang seimbang baik jenis (nabati atau hewani) maupun mutu dan gizi.
c) Peningkatan konsumsi bahan pangan lokal yang berbasis pada non beras.
d) Peningkatan pembinaan keamanan, mutu dan gizi pangan, mulai dari Prima 3, Prima 2 dan Prima 1.

Swasembada, dan Swasembada Berkelanjutan Daging Sapi dan Kerbau

Pada tahun 2014, tingkat konsumsi daging sapi per kapita diproyeksikan berjumlah 2,24 kg/tahun, atau naik sekitar 6,1 %/thn, dan pada tahun 2018 tingkat konsumsi daging sapi per kapita diharapkan akan mencapai tingkat 2,85 kg/tahun. Pada tahun 2014, porsi daging impor dari total produksi daging sapi dibatasi menjadi 9,72% atau di bawah 10% yang menjadi prasyarat dicapainya swasembada. Sejak 2014 sampai dengan 2018, tingkat swasembada daging sapi diupayakan berlanjut.

Di Tingkat nasional, peningkatan konsumsi per kapita berdampak kepada total konsumsi daging sapi yang naik dari 417 ribu ton (tahun 2010) menjadi 562 ribu ton (tahun 2014). Proyeksi konsumsi ini diimbangi oleh produksi daging domestik yang diproyeksikan dari 196 ribu ton (tahun 2010) menjadi 507 ribu ton (tahun 2014). Secara bersamaan maka terjadi pengurangan jumlah pasokan daging impor dari 221 ribu ton (tahun 2010) menjadi hanya 55 ribu ton (tahun 2014), atau dengan tingkat pengurangan -28,6%/tahun. Pada tahun 2014, porsi daging ex impor ditargetkan pada tingkat 9,72% dari total pasokan daging. Target yang sangat berat dicapai, namun dengan kontribusi provinsi tentunya diharapkan dapat dicapai dengan baik.

Target produksi daging sapi tersebut juga memiliki implikasi terhadap peningkatan populasi baik sapi potong, perah, maupun kerbau. Populasi ternak sapi potong diharapkan meningkat dari 14,4 juta ekor (tahun 2010) menjadi 17,7 juta ekor (tahun 2014), atau dengan tingkat pertumbuhan 5,2%/tahun. Begitu juga sapi perah diproyeksikan meningkat dari 582 ribu ekor (tahun 2010) menjadi 697 ribu ekor (tahun 2014) dengan tingkat kenaikan 4,6%/tahun. Sementara itu tingkat kenaikan populasi kerbau diproyeksikan jauh lebih rendah yaitu 0,7% per tahun, peningkatan populasi dari 1,30 juta ekor (tahun 2010) menjadi 1,34 juta ekor (tahun 2014).

Hasil pendataan populasi sapi potong, sapi perah, dan kerbau (PSPK) yang dilakukan melalui sensus pada tahun 2011 menunjukkan bahwa populasi sapi potong dilaporkan berjumlah 14,8 juta ekor.

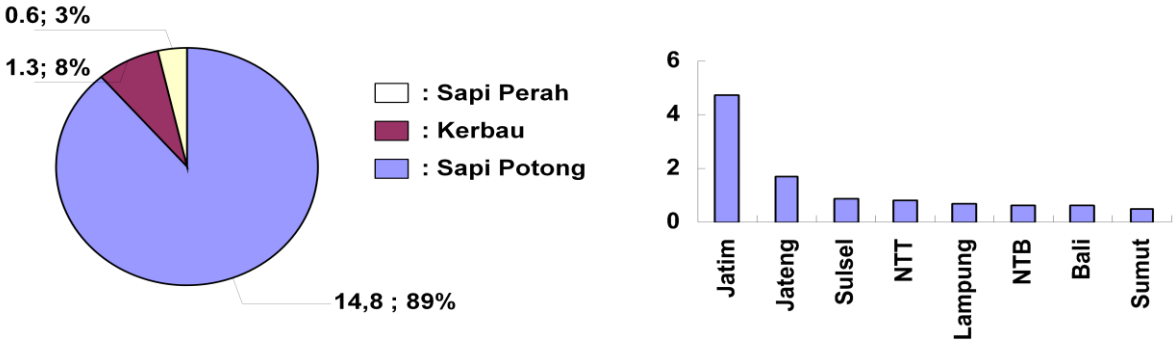

Gambar. Populasi sapi potong, sapi perah, dan kerbau hasil PSPK 2011

Capaian populasi (14,8 juta ekor) tersebut masih dibawah target populasi sapi potong tahun 2011 yaitu 15,2 juta ekor, atau baru mencapai 97%. Target populasi sapi perah dan kerbau sudah bisa terpenuhi.

Sejalan dengan visi Dinas PKH, maka target pencapaian swasembada daging sapi dan kerbau di Provinsi Sumatera Utara juga diharapkan terwujud pada tahun 2014, dengan tingkat konsumsi daging sapi per kapita berjumlah 1,93 kg/tahun. Pada tahun 2018, tingkat konsumsi daging sapi per kapita masyarakat provinsi Sumatera Utara ditargetkan untuk menyamai tingkat nasional yaitu 2,85 kg/tahun.

Proyeksi jumlah penduduk Sumatera Utara pada tahun 2014 adalah 13,9 juta jiwa, naik dengan kecepatan 1,24%/tahun (Tabel 3.4). Dengan tingkat konsumsi daging sapi per kapita sebesar 1,84 kg/tahun, maka kebutuhan terhadap daging sapi tahun 2014 adalah 25.562 ton/tahun.

Tingkat konsumsi daging kerbau per kapita ditetapkan pada tahun 2014 ditargetkan pada tingkat 0,55 kg/tahun. Oleh karena itu kebutuhan terhadap daging kerbau tahun 2014 adalah 7.669 ton/tahun.

Tabel. Proyeksi perkembangan konsumsi dan produksi daging sapi/kerbau, serta populasi sapi/kerbau tahun 2014 – 2018 di Sumatera Utara

No	Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Konsumsi daging sapi	Kg/kap/th	1.84	1.89	1.94	1.99	2.03
2	Produksi daging sapi	Ton/th	25.661	26.708	27.755	28.801	29.847
3	Populasi sapi potong	Ekor	643.333	660.703	678.542	696.863	715.678
4	Konsumsi daging kerbau	Kg/kap/th	0.55	0.57	0.58	0.60	0.61
5	Produksi daging kerbau	Ton/th	7,669	7,981	8,294	8,607	8,919

6	Populasi kerbau	Ekor	132.326	132.749	133.174	133.600	134.028

Pada tahun 2018 proyeksi jumlah penduduk Sumatera Utara adalah 14,6 juta jiwa. Menggunakan tingkat konsumsi daging sapi per kapita yang sudah mencapai 2,03 kg/tahun, maka kebutuhan terhadap daging sapi tahun 2018 adalah 29.731 ton/tahun. Menggunakan asumsi bahwa 18% dari total populasi dipotong per tahunnya, maka populasi ternak sapi adalah 1.126.424 ekor. Tingkat konsumsi daging kerbau per kapita ditetapkan pada tahun 2018 ditargetkan pada tingkat 0,61 kg/tahun. Oleh karena itu kebutuhan terhadap daging kerbau tahun 2018 adalah 8.919 ton/tahun. Menggunakan asumsi 18% dari total populasi dipotong setiap tahun, maka populasi ternak kerbau pada tahun 2018 minimal harus mencapai 263.472 ekor.

Pengembangan Bibit Ternak

Bibit ternak adalah bibit yang memiliki mutu genetik tinggi dan sifat ini siap diturunkan kepada keturunannya. Pengembangan bibit ternak di Sumatera Utara didukung oleh faktor kekuatan yang meliputi, rekognisi pusat sebagai wilayah pengembangan bibit sapi potong PO, cukup luasnya lahan pengembangan ternak, cukup banyaknya perusahaan pembibitan ternak, dan populasi ternak yang cukup tinggi. Kekuatan ini juga didukung oleh adanya peluang bahwa terdapat kredit pembibitan yang cukup besar yang disediakan pihak perbankan, selain adanya dukungan program dari pusat yang cukup besar dan berkelanjutan.

Namun demikian, juga teridentifikasi adanya beberapa kelemahan yang meliputi kurang tersedianya bibit unggul yang berkualitas, belum memadainya jumlah dan kualitas straw/sperma untuk mendukung program IB, perkawinan alam yang di tingkat peternakan rakyat belum terkendalikan dengan baik, seleksi terhadap induk dan turunannya masih belum dilakukan dengan baik, dan kredit perbankan untuk pembibitan ternak belum termanfaatkan secara maksimal. Sementara itu, sampai saat ini belum terlihat adanya zonasi pusat pembibitan ternak yang jelas, sehingga menyulitkan penetapan fokus pengembangan di suatu daerah. Pengembangan bibit juga mendapatkan ancaman berupa adanya bibit berkualitas yang dijual ke luar provinsi, dan masih adanya pemotongan betina produktif. Sementara itu, kelompok tani ternak yang ada terlihat kurang motivasi sehingga sangat peka terhadap goncangan internal maupun external.

Berdasarkan bahasan di atas, maka strategi pengembangan bibit yang perlu dilakukan adalah peningkatan mutu genetik ternak yang disesuaikan dengan zonasi yang sebelumnya ditetapkan. Misalnya, pusat pembibitan ternak sapi potong PO telah ditetapkan di Kabupaten Simalungun, dan Serdang Bedagai. Di tempat ini sebaiknya ditetapkan kelompok-kelompok ternak yang sepakat menjadi pusat pembibitan ternak di perdesaan (Village Breeding Center atau VBC). Untuk setiap VBC ini dilakukan seleksi induk berdasarkan ciri-ciri induk PO yang baik. Sistem perkawinan dapat dilakukan melalui IB atau kawin alam, yang keduanya menggunakan sperma atau pejantan PO unggul. Perkawinan alam yang terjadi sebaiknya dikendalikan, misalnya dengan menerapkan kebijakan kawasan bebas pejantan.

Pada komoditas ternak ayam buras, pengembangan bibit unggul seperti ayam "KUB" atau Kampung Unggul Balitnak sebaiknya dilakukan di setiap VBC ayam buras yang sebelumnya ditetapkan. Ayam KUB dikenal dengan produktivitas telurnya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kampung biasa.

Selain ayam buras, pengembangan bibit itik juga perlu diperhatikan. Itik unggul petelur seperti itik Mojosari Alabio (MA) hasil penelitian Badan Litbang Pertanian cukup baik untuk dikembangkan.

Untuk ayam ras petelur dan pedaging, bibit unggul yang biasanya dipasok oleh perusahaan ternak besar harus dijaga kelangsungannya. Umumnya, kemitraan antara perusahaan tersebut dengan para peternak sudah berjalan dengan baik.

Perbaikan mutu genetik kambing sudah dilakukan dengan mengembangkan kambing "Boerka" yang merupakan kambing pedaging. Pengembangan lebih lanjut dari kambing tersebut perlu segera dilakukan di VBC kambing Boerka yang sebelumnya ditetapkan. Program seleksi yang disertai perkawinan yang terkendali akan membentuk kelompok ternak dengan mutu genetik tinggi. Selain tipe pedaging, pembibitan kambing tipe perah juga perlu dikembangkan. Sampai saat ini belum tersedia VBC kambing perah sehingga cukup menyulitkan bagi petani ternak untuk mendapatkan bibit hasil seleksi.

Secara keseluruhan, dalam pengembangan bibit ternak perlu ditetapkan a) zona komoditas ternak unggulan, dan b) VBC. Target produk dari VBC tentunya bibit hasil seleksi yang bermutu tinggi, baik sebagai calon induk ataupun sebagai calon pejantan. Hal ini perlu didukung oleh unit sertifikasi bibit yang melindungi kepentingan konsumen. Selain itu, kebijakan berupa Perda diperlukan untuk mengatur suatu wilayah pembibitan berbasis kawin alam sehingga perkawinan hanya terjadi dengan menggunakan pejantan terpilih. Pada kawasan pembibitan yang menggunakan Inseminasi Buatan (IB), ketersediaan dan distribusi sperma beku berkualitas sesuai dengan bangsa ternak yang akan dikembangkan perlu dijamin kontinuitasnya.

Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan PHMS.

Terdapat beberapa Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) termasuk rabies, hog cholera, flu burung, brucellosis, dan antrax.

Rabies. Rabies adalah penyakit ensephalitis yang bersifat akut, progresif dan hingga saat ini belum ada obatnya yang disebabkan oleh virus rabies yang sudah sangat lama dikenal manusia sebagai penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia. Rabies dapat menginfeksi semua hewan berdarah panas, rabies pada manusia selalu dihubungkan dengan anjing karena lebih dari 90% infeksi pada manusia disebabkan oleh gigitan anjing. Pada tahun 2010, kasus gigitan anjing dilaporkan terjadi di 21 kab/kota.

Kasus gigitan anjing paling banyak terjadi di kabupaten Dairi, Tobasa, dan

Simalungun, Nias, dan Samosir. Terdapat 157 kasus gigitan anjing di kabupaten Dairi, selanjutnya 82 kasus di kab. Tobasa, 58 kasus di kab. Simalungun, Nias dan Samosir masing-masing dilaporkan terjadi 46 kasus gigitan anjing.

Namun demikian, pengendalian rabies terlihat sudah intensif dilakukan. Hal ini ditunjukan bahwa pada tahun 2010 telah dilakukan distribusi vaksin rabies ke 33 kabupaten/kota yang berkisar antara 500 – 2.500 dosis dengan total vaksin sebanyak 43.000 dosis. Jumlah dosis tersebut termasuk vaksin yang disimpan di Provinsi (3.550 dosis) untuk melayani kebutuhan darurat.

Hog Cholera (HC). Jumlah serangan Hog Cholera dilaporkan paling banyak di kabupaten Tapanuli Utara, Nias Selatan, Nias Utara, Nias dan Tobasa (Gambar 3.3). Pada tahun 2010, di kabupaten Tapanuli Utara dilaporkan serangan hog cholera sejumlah 1.748 ekor atau 10,3% dari populasi, dan dalam jumlah yang cukup banyak juga juga dilaporkan di Kabupaten Nias Selatan yaitu 1.560 ekor atau sekitar 8,0% dari populasi. Pengendalian Hog Cholera (HC) di Sumatera Utara diprioritaskan pada daerah-daerah padat populasi babi atau daerah sumber bibit babi. Pelaksanaan vaksinasi dan pemeriksaan titer anti body dilakukan secara rutin untuk mengetahui gambaran dan kekebalan penyakit pada ternak babi.

Selain dua kabupaten tersebut, kasus serangan hog cholera yang cukup tinggi juga dilaporkan di Nias Utara dengan 750 kasus atau sekitar 6,9% dari populasi. Namun demikian, distribusi vaksin untuk hog cholera ternyata belum seja lan dengan jumlah kasus serangan yang ada. Misalnya pada tahun 2010, untuk Tapanuli Utara diberikan vaksin HC sejumlah 1.500 dosis, padahal jumlah serangan adalah tertinggi yaitu 1.748 ekor. Selain itu, untuk Nias Selatan yang dilaporkan mendapat serangan HC sejumlah 1.560 ekor hanya diberikan vaksin sejumlah 200 dosis. Oleh karena itu, distribusi jumlah vaksin yang proporsional sejalan dengan jumlah kasus serangan HC yang ada sebaiknya dilakukan.

Flu Burung (Avian Influenza, AI). Penyakit Avian Influenza (AI) pertama-tama ditemukan di Sumatera Utara pada bulan Juli 2005 di kabupaten Simalungun. Penyakit ini menular dengan cepat di beberapa kabupate/kota, dan pada tahun 2010 dilaporkan terbanyak di kab. Tapanuli Selatan dimana terdapat 1.682 kasus.

Selain Kabupaten Tapanuli Selatan, kasus AI juga dilaporkan terjadi di banyak kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Penanggulangan dan Penanganan dilakukan dengan pelaksanaan vaksinasi dan desinfeksi (sanitasi kandang) dan pelaksanaan "local culling" atau pemusnahan terbatas disekitar titik kasus ditemukan. Pelaksanaan local culling dilakukan jika pengamatan dan uji rapid tes positif pada bangkai yang yang mati mendadak.

Namun demikian, pengendalian AI pada tahun 2010 belum memadai, hal ini ditunjukan oleh minimalnya antigen AI yang disebarkan. Hanya terdapat 240 test Antigen AI yang dibagikan ke 12 kabupaten/kota.

Penyakit Ngorok (SE). Penyakit SE (Septichaema epizootica) atau shipping fever yang disebabkan oleh bakteri *Pasteurella multocida* atau *P. Haemoyitica* ternyata pada tahun 2010 juga dilaporkan menyerang di 12 kabupaten/kota. Namun demikian, serangan tertinggi terjadi di kabupaten Nias Selatan yaitu dengan 313 kasus. Serangan di kabupaten/kota lainnya dilaporkan hanya berkisar antara 1-74 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian penyakit SE cukup berhasil.

Penyakit ND. Penyakit tetelo atau ND (Newcastle Disease) merupakan jenis penyakit yang telah lama dikendalikan. Namun demikian, data tahun 2010 menunjukkan bahwa masih terdapat serangan ND sejumlah 38.864 kasus di 21 kabupaten/kota.

Brucellosis (Gangguan Reproduksi). Penaggulangan gangguan reproduksi dilakukan dengan pengambilan sampel darah pada sapi potong, yang kemudian dilakukan tindakan pemeriksaan dengan RBT untuk mengetahui apakah ada sampel yang positif atau tidak dari hasil pemantauan selama 3 tahun terakhir di Kabupaten/Kota tidak ditemukan positif Brucellosis sehingga Sumatera Utara mengarah kepada bebas Brucellosis.

Anthrax dan PMK. Penyakit Anthrax (Radang Limpa) merupakan penyakit zoonosis yaitu mampu menyerang manusia. Sementara itu, penyakit mulut dan kuku (PMK) atau *Apthae epizootica* (AE) disebabkan oleh virus *Rhinovirus*. Sampai saat ini Sumatera Utara dinyatakan bebas dari kedua penyakit berbahaya ini. Namun demikian, monitoring dan pengendalian yang intensif sangat diperlukan agar tetap dapat mempertahankan Sumut sebagai provinsi yang bebas kedua penyakit tersebut. Bebasnya suatu wilayah dari anthrax dan PMK akan meningkatkan potensi daya jual ternak dari wilayah tersebut.

Pakan Ternak

Pengembangan pakan ternak di Sumatera Utara sangat memungkinkan karena adanya faktor kekuatan yang meliputi a) adanya bahan baku pakan yang cukup berlimpah, b) tersedianya SDM peternakan yang cukup banyak, c) jumlah ternak yang cukup banyak, dan d) semakin meningkatnya kebutuhan terhadap pakan ternak. Selain itu, pengembangan pakan ternak juga didukung oleh adanya peluang berupa a) cukup banyaknya lahan pengembangan, dan b) tersedianya skim kredit usaha peternakan.

Namun demikian, kekuatan dan peluang tersebut menghadapi tantangan berupa kelemahan dan ancaman terhadap pengembangan pakan. Kelemahan yang telah diindetifikasi meliputi a) masih rendahnya tingkat penerapan teknologi, b) kurangnya kebijakan pendukung, c) rendahnya produktivitas ternak, d) kurang menyebarnya populasi ternak, dan e) kurangnya koordinasi antara SKPD provinsi dan Kabupaten/Kota. Sementara itu, ancaman pengembangan pakan ternak yang dapat dikenali adalah a) masih terjadinya ekspor bahan pakan, dan b) dan berfluktuasinya ketersediaan pakan.

Berdasarkan fakta di atas, maka strategi pengembangan pakan sebaiknya adalah dengan memanfaatkan bahan baku pakan yang berlimpah, yang didukung oleh peningkatan penerapan teknologi. Bahan baku pakan yang melimpah ini didapatkan dari bebagai ekosistem meliputi tanaman pangan, dan perkebunan.

Limbah pertanian, perkebunan dan agro-industrinya memiliki potensi yang besar sebagai sumber pakan ternak ruminansia. Beberapa permasalahan pemanfaatan hasil ikutan pertanian sebagai pakan ternak adalah nilai nutrisinya yang rendah,

penyimpanannya banyak menyita tempat dan cepat rusak. Pengembangan agribisnis sapi potong sebaiknya diarahkan pada budidaya peternakan yang menerapkan model LEISA terutama melalui Sistem Integrasi Tanaman Ternak (SITT, Maryono dkk., 2009). SITT antara ternak dengan tanaman pangan maupun perkebunan diyakini dapat menurunkan biaya produksi melalui optimalisasi pemanfaatan hasil ikutan pertanian, perkebunan dan agro-industri setempat dan sedikit mungkin menggunakan pakan tambahan yang berasal dari luar. Optimalisasi penggunaan bahan pakan hasil ikutan tanaman pertanian dan perkebunan yang potensial diharapkan dapat menurunkan biaya ransum namun tetap mampu meningkatkan produktivitas ternak sapi potong.
Manfaat hasil ikutan tanaman pertanian, perkebunan dan agro-industri sangat dirasakan pada saat : (1). Jumlah ternak yang diusahakan banyak; (2). Musim sulit pakan (kemarau); (3) Tenaga kerja terbatas (musim tanam, panen, dll.), dan (4). Lahan pertanian dibudidayakan secara intensif.

Tanaman Padi (*Oryza sativa*). Hasil ikutan tanaman padi adalah jerami, dedak dan sekam, untuk setiap ton gabah yang dipanen menyisakan jerami padi sekitar 1,35 ton (Putun *dkk.*, 2004). Proses penggilingan gabah kering akan menghasilkan sekitar 10 % dedak, 2 % menir (beras yang rusak/hancur), dan 24-25 % sekam (Kariyasa, 2006). Jerami padi merupakan pakan sumber serat sedangkan dedak dapat berfungsi sebagai sumber serat dan/atau energi. Sekam tidak umum digunakan sebagi pakan karena kadar lignin tinggi dan terikat oleh silika sehingga sulit tercerna serta tidak disukai ternak.

Berbagai perlakuan terhadap jerami padi untuk meningkatkan nilai gizi telah banyak digunakan, namun bagi peternak kecil tampaknya suplementasi dengan sisa hasil agro-industri pertanian ataupun tanaman leguminosa merupakan pilihan yang mudah diterapkan (Martawijaya, 2003). Pemberian jerami padi fermentasi *ad-libitum* bersama 4-5 kg konsentrat per ekor per hari pada sapi penggemukan mampu menghasilkan pertambahan bobot badan sebesar 0,72 kg/ekor/hari (Anggraeny dan Umiyasih, 2004).

Dedak sudah umum dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak dimana nilai nutrisinya bervariasi tergantung pada jenis padi dan jenis mesin penggiling. Umumnya, semakin baik kualitas dedak padi, semakin mudah tengik. Kualitas dedak padi yang baik mudah terkontaminasi oleh bakteri dan jamur penghasil enzim lipase. Enzim tersebut menguraikan minyak dalam dedak padi menjadi asam lemak mudah terbang yang berbau tengik sehingga kurang disukai ternak (Mathius dan Sinurat, 2001), lebih lanjut disebutkan bahwa dedak mengandung zat antinutrisi *myoinositol* (asam fitat) yang menghambat ketersediaan mineral dalam ransum. Pada usaha pembibitan dan penggemukan, dedak padi dapat menggantikan konsentrat komersial hingga 100%, terutama dedak padi kualitas baik yang biasa disebut dengan pecah kulit (PK) 2 dan sparator, yaitu dedak padi yang dihasilkan pada penggilingan padi tahap ke-dua menggunakan mesin penyosoh (*polisher*), terutama pada penyosohan ke-dua, karena dedak ini tidak tercampur dengan serpihan sekam (Widowati, 2001).

Tanaman ubi kayu (*Manihot utilissima*). Pada pemanenan tanaman ubi kayu dihasilkan 50 % umbi, 44 % batang dan 6 % daun (Devendra, 1977). Daun ubi kayu umum digunakan sebagai pakan ruminansia sementara batangnya untuk kayu bakar (Saono dan Sastrapradja, 1983). Andrizal (2003), melaporkan bahwa di Indonesia sebagian besar ubi kayu digunakan untuk pangan (54,2%), sisanya untuk bahan baku industri, seperti industri tepung tapioka (19,7%), industri pakan ternak (1,8%) dan industri non pangan lainnya (8,5%), serta diekspor (15,8%). Asam sianida (HCN) adalah zat anti nutrisi utama yang dapat ditemukan pada daun dan umbi ubi kayu. Kandungan asam sianida dalam daun singkong sangat tinggi, antara 400-600 ppm (Mathius dan Sinurat, 2001).
Semua hasil ikutan pemrosesan ubi kayu baik kering maupun basah dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, diantaranya adalah kulit umbi, onggok (gamblong), gaplek (*cassava chips*) afkir dan sebagainya. Sering kali ubi kayu sengaja diproses sebagai bahan pakan sapi dalam bentuk gaplek dan pelet, bahan ini biasanya merupakan komoditas ekspor.

Bahan pakan asal ubi kayu tergolong sebagai sumber karbohidrat yang mudah dicerna. Hasil penelitian telah banyak membuktikan, bahwa bahan pakan asal ubi kayu mempunyai manfaat biologis yang lebih baik dibandingkan dengan dedak padi kualitas rendah sampai sedang.

Tanaman Kedelai (*Glycine soya*). Jerami kedelai jarang digunakan sebagai pakan, diduga karena proses pemanenan kedelai mengharuskan jerami dikeringkan. Jerami kedelai kering bertekstur keras dan berdebu sehingga tidak disukai ternak, bahkan sapi yang diberi pakan tunggal jerami kedelai bobot badannya menurun (FFTC, 2008). Kedelai merupakan salah satu bahan pakan yang bernilai biologis tinggi. Penggunaan kedelai sebagai pakan ternak ruminansia belum umum digunakan di Indonesia karena harganya mahal, bersaing dengan kebutuhan pangan dan ternak monogastrik. Hasil ikutan kedelai yang banyak digunakan sebagai pakan ternak ruminansia adalah kulit buah (polong), batang dan kulit polong, kulit ari biji, ampas tahu, ampas kecap dan kedelai afkir. Mathius dan Sinurat (2001) melaporkan bahwa nutrisi ampas tahu sangat bervariasi tergantung cara yang digunakan dalam pembuatan tahu. Kandungan protein yang tinggi (23-29 %) dengan kadar air yang tinggi dari ampas tahu, merupakan kendala dalam pendistribusiannya, sehingga sangat disarankan untuk dikeringkan terlebih dahulu. Ampas tahu, dan kulit ari biji sangat baik diberikan pada sapi menyusui atau penggemukan; dapat menggantikan konsentrat komersial hingga 75 %. Namun demikian, bahwa untuk sapi penggemukan, pemberian ampas tahu dalam waktu yang lama (>6 bulan) dan dalam jumlah banyak (konsumsi BK ampas tahu ≥ 1% dari bobot badan sapi) dapat mengakibatkan tekstur daging kurang padat dan berlemak. Siregar dan Nurhasanah (1986) dalam Mathius dan Sinurat (2001) melaporkan penggunaan ampas tahu sebagai pengganti bungkil kelapa (pada level 32 % konsentrat), menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan bungkil kelapa dalam konsentrat. Imai *dkk*. (1996) dalam Mathius dan Sinurat (2001) mencampurkan 20 % ampas tahu dalam konsentrat komersial pada penggemukan sapi mampu menghasilkan pertambahan bobot badan 1,10 kg/ekor/hari tidak berbeda dengan yang menggunaan konsentrat komersial.

Tanaman tebu (*Saccharum officinarum*). Hasil ikutan tanaman tebu merupakan pakan sumber serat atau energi; yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak ruminansia adalah daun tebu, ampas tebu (bagase), blotong (kotoran yang terpisah saat penapisan nira tebu) dan tetes (molases). Yang termasuk daun tebu adalah pucuk tebu, momol (sebagian pupus dari pucuk tebu), daun klentekan (daun tebu yang diperoleh dari pelepasan 3-4 lembar daun pada saat tebu berumur 4, 6 dan 8 bulan; masing-masing disebut klentekan 1, 2 dan 3 dan tunas tebu yang diafkir, sering disbut dengan sogolan, yaitu tunas-tunas baru yang tumbuh yang biasanya disebabkan oleh robohnya batang tebu pada perkebunan beririgasi baik (Silitonga, 1983). Pemberian pucuk tebu selama empat minggu pada pedet sapi Bali lepas sapih mampu meningkatkan konsumsi bahan kering pakan (30,77 %) dan efisiensi pakan (14,50 %) dibandingkan pemberikan rumput gajah, selama empat minggu pucuk tebu mampu meningkatkan bobot badan 7,1 kg sedangkan rumput gajah meningkat sebesar 4,7 kg (Rangkuti dan Djajanegara, 1983). Wafer daun tebu kering belum banyak digunakan oleh peternak dalam negeri, namun telah banyak diekspor untuk usaha peternakan di Jepang dan Korea. Ampas tebu banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas dan media budidaya jamur. Tetes telah umum digunakan sekitar 5 – 7 % yang berfungsi sebagai perekat pakan, dan penambah kesukaan (palatabilitas).

Hijauan pakan ternak (HPT) sumber protein yang dapat dikembangkan berupa legum herba atau legum pohon. Untuk kondisi lahan pertanian intensif, legum pohon lebih sesuai karena dapat dikembangkan dalam bentuk pagar hidup yang ditanam memanjang batas lahan ataupun di sekeliling kandang.

Legum Gamal (*Gliricidia sepium*). Legum pohon ini tumbuh baik pada daerah dengan curah hujan 900 – 1500 mm per tahun dengan lima bulan kering setahun. Namun terbukti tumbuh baik juga di daerah dengan curah hujan 3500 mm per tahun tanpa musim kemarau panjang. Toleran terhadap tanah masam dan alkalin, namun memerlukan kesuburan sedang (Skerman dkk, 1988 dalam Ibrahim, 2009).

Tanaman berumur 1 tahun menghasilkan bahan kering 3-4 kg sekali panen. Pada jarak tanam 0,5 m x 0,5 m bisa menghasilkan hijauan segar sampai 43 t/ha/tahun. Kandungan protein pada daun 19-25%, serat kasar 13-30%. Daun gamal mempunyai kualitas tinggi sebagai pakan ternak, dan disukai ternak ruminansia. Namun demikian, kadang-kadang perlu waktu untuk disukai karena baunya yang tidak enak, oleh karena itu perlu pelayuan.

Legum lamtoro (*Leucaena leucocephala*). Legum pohon ini tumbuh di daerah dataran rendah sampai 1000 m dpl, namun ada juga kultivar yang bisa tumbuh pada ketinggian lebih dari 1500 m dpl. Curah hujan yang ideal 650 – 1500 mm per tahun tapi ada juga yang tumbuh di tempat yang lebih kering atau lebih basah. Kemasaman tanah yang cocok adalah pH > 5, dan legum ini kurang toleran terhadap Al, tapi masih bisa tumbuh pada salinitas tinggi, dan tanaman ini tidak menyukai tanah yang tergenang (Skerman dkk, 1988 dalam Ibrahim, 2009). Hasil bahan kering hijauan berkisar antara 1 – 15 t/ha tergantung pada, kesuburan tanah, curah hujan, dan cara pemangkasan. Semakin sering dipangkas hasilnya semakin berkurang. Daunnya merupakan pakan yang berkualitas tinggi terutama pada musim kemarau.

Pengembangan pakan ternak perlu didukung oleh meningkatnya pengetahuan dan keterampilan SDM peternakan. Oleh karena itu, pelatihan, dan magang bagi para petugas perlu dilakukan. Pada saat yang tidak terlalu lama, pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh petugas perlu ditularkan melalui praktek, dan percontohan yang dilakukan secara partisipatif bersama petani ternak. Pada saat yang sama, kerjasama yang baik perlu direncanakan dan diwujudkan dengan berbagai SKPD terkait seperti Badan Penyuluhan, BPTP, Dinas Koperasi, dan SKPD lainnya yang memiliki kepentingan yang serupa.

Ketersediaan Pangan Hewani.

Pangan hewani adalah produk asal hewan yang dijadikan konsumsi manusia seperti daging, telur, dan susu. Pangan hewani yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) sudah diupayakan untuk dijamin ketersediaannya. Namun demikian, masih sering terjadi kendali pengawasan yang kurang ketat terhadap kesehatan hewan baik *ex ante* maupun *post mortem*, utamanya pada hari-hari besar keagamaan. Masih sering dijumpai ternak dipotong dalam kondisi yang belum layak. Untuk itu, ke depan perlu dibuat SOP (prosedur operasi standar) tentang pengawasan terhadap pemotongan ternak pada hari-hari tersebut yang diterapkan dalam rangka membangun otoritas veteriner.

Keterbatasan pengawasan juga berkaitan dengan masih sedikitnya petugas kesmavet di kabupaten/kota, terutama di tempat-tempat pemotongan, dan pasar tradisional. Oleh karena itu, peningkatan jumlah petugas Kesmavet perlu menjadi prioritas. Selain itu, peningkatan SDM petugas Kesmavet juga perlu didukung oleh sosialisasi yang intensif tentang pentingnya pangan hewani yang ASUH bagi masyarakat. Dengan demikian, dapat diharapkan adanya sinergi antara petugas dan masyarakat dalam menyediakan produk pangan hewani yang ASUH.

Sumber Daya Manusia

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan masa kini dan masa yang akan datang memerlukan sumber daya manusia peternakan yang lebih berkualitas. Hal ini disebabkan karena pembangunan perternakan dihadapkan kepada persaingan global yang semakin ketat dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju lebih dahulu. Mereka telah mampu menawarkan produk dan jasa secara lebih profesional, kualitas lebih baik dan harga lebih murah.

Sumber daya manusia peternakan terdiri dari para peternak dan aparat pembina mulai dari pusat hingga ke daerah meliputi perencana, pelaksana, peneliti dan penyuluh serta aparat pelaksana lain yang terkait tetapi berada di luar jajaran peternakan dan kesehatan hewan. Sumber daya manusia yang berkualitas selain merupakan unsur terpenting dan perlu memperoleh prioritas dalam pembangunan, juga sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pemabangunan peternakan. Manusia adalah kekuatan utama sebagai pelaku dan sekaligus sebagai tujuan dan sasaran pembangunan peternakan. Sebagai kekuatan utama dan pelaku, manusia merupakan salah satu faktor produksi yang diharapkan mampu menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas, sedangkan sebagai tujuan dan sasaran pembangunan peternakan, manusia harus menikmati kesejahteraan dari hasil pembangunan tersebut.

Demikian penting dan strategisnya posisi sumber daya manusia, sehingga secara terus-menerus perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan kualitasnya melalui peningkatan efektifitas pendidikan, penyuluhan dan pelatihan, mengembangkan keterpaduan antar sub sistem dalam sistem agribisnis dan kesehatan hewan nasional, menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan kelembagaan formal dan informal.

Peningkatan sumber daya manusia dapat diukur secara kuantitas dari peningkatan pendapatan dan daya beli rumah tangga peternak serta peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi, sedangkan secara kualitas dicerminkan oleh peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan, penguasaan kualitas keterampilan, semangat dan etos kerja, disiplin dan tanggung jawab.

Arah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peternakan. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Sumatera Utara dengan mengacu kepada pendekatan sistem agribisnis dan sistem kesehatan hewan nasional sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, diperlukan kualifikasi sumber daya manusia peternakan yang memiliki perilaku sebagai berikut:

a. Berperilaku sistem agribisnis dan kesehatan hewan serta diversifikasi, dengan titik berat pendapatan dan kesejahteraan untuk mencapai swasembada pangan hewani dalam arti kualitas. Perilaku ini mengandalkan teknologi sumber daya dan produktivitas pertenaga kerja dengan tetap mempertahankan kelestarian sumber daya alam,
b. Berperilaku mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan alat dan mesin yang efektif dan efisien,
c. Berperilaku kemitraan dan partisipatif, yang bertindak sebagai pelayan, pendamping dan fasilitator,
d. Berperilaku mementingkan kualitas,
e. Berperilaku dan berbudaya disiplin terhadap pekerjaan.

Untuk itu arah peningkatan kualitas sumber daya manusia peternakan tahun 2013 – 2018 melalui pendidikan, penyuluhan dan pelatihan adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia peternakan yang berkualitas tinggi dengan mengembangkan perilaku – perilaku tersebut diatas dengan berbagai cara dan media yang tepat sehingga memenuhi kemandirian untuk berkompetisi dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam peternakan secara optimal dalam rangka pengembangan sistem agribisnis terpadu dan terintegrasi yang ditopang oleh demokrasi ekonomi yang menerapkan azas keseimbangan, keselarasan, keterpaduan antar setiap pelaku-pelaku ekonomi. Untuk itu, perlu ditingkatkan kualitas kemandirian sumber daya manusia peternakan meliputi kualitas moral, kualitas intelektual, kualitas profesional serta kualitas fisik prima.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia peternakan tahun 2013-2018 di Provinsi Sumatera Utara mendapat prioritas yang akan dilakukan melalui pendidikan kedinasan, pelatihan petugas, penyuluhan dan pelatihan peternak dengan berbagai metoda dan media yang tepat mengacu kepada strategi sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas aparatur peternakan dan kesehatan hewan, pendayagunaan aparatur, tenaga terdidik dan peternak dalam mebangun dan

mengembangkan peternakan dan kesehatan hewan, serta meningkatnya kualitas dan kuantitas kelembagaan sumber daya manusia (inovasi, partisipasi, kerjasama, orientasi pasar) peternak,

b. Dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2013-2018 dan setiap tahapnya mempunyai tujuan yang jelas dan terukur,
c. Sasaran utama pembangunan sumber daya manusia adalah pengembangan agribisnis peternakan dan kesehatan hewan nasional dengan mempercepat proses transformasi struktur sosial ekonomi dengan memperhatikan sumber-sumber potensi spesifik lokasi,
d. Peningkatan mutu aparatur melalui pendidikan dan latihan dilaksanakan untuk pengembangan profesionalisme sehingga mampu menciptakan iklim yang mendorong prakarsa dan swadaya peternak, serta mampu melaksanakan tugas-tugas pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Sumatera Utara.
e. Peningkatan mutu hasil pendidikan menengah dan pendidikan tinggi peternakan harus mampu mengantisipasi peningkatan mutu peternak, pengembangan agribisnis dan kesehatan hewan, perkembangan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja pada bidang peternakan,
f. Pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia peternakan dengan arah terwujudnya sistem agribisnis dan kesehatan hewan dicirikan oleh peningkatan nilai tambah, peningkatan pendapatan, serta penigkatan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja yang lebih besar,
g. Peningkatan mutu sumber daya manusia peternakan dalam jangka panjang meliputi peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai dan diterapkan oleh aparatur dan peternak, budaya kerja, disiplin dan tanggung jawab, kelembagaan yang transparan, serasi dan berimbang dalam pembagian risiko dan keuntungan dan nilai gizi yang dinamis,
h. Pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia peternakan perlu diselaraskan dengan pengembangan infrasturktur pedesaan dan potensi sumber-sumber pembangunan peternakan spesifik lokasi,
i. Peningkatan kualitas sumber daya manusia peternakan perlu diselaraskan dengan keahlian dan potensi yang dibutuhkan, shingga sumber-sumber pembiayaan yang tersedia dapat didayagunakan sebaik-baiknya dalam mengupayakan tranformasi struktur sosila ekonomi pedesaan,

Peningkatan dan penyempurnaan perencanaan sumber daya manusia peternakan yang berkesinambungan yang didasarkan atas kebutuhan nyata pengembangan tenaga kerja produktif serta terampil/profesional.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pembangunan Ketahanan Pangan dan Peternakan ditujukan untuk memenuhi ketersediaan pangan sampai ke tingkat rumah tangga, melalui:

1) Pemantapan ketersediaan pangan dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki secara berkelanjutan.
2) Pemantapan kelancaran distribusi pangan untuk menjamin stabilitas pasokan pangan secara merata dan terjangkaunya daya akses pangan masyarakat.
3) Peningkatan percepatan diversifikasi konsumsi, mutu dan keamanan pangan.
4) Pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan.
5) Terpenuhinya pangan asal ternak bagi masyarakat, bahan baku industri dan ekspor.
6) Optimalisasi pemanfaatan teknologi peternakan.
7) Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak.
8) Ketersediaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Sasaran pembangunan ketahanan pangan dan peternakan di Sumatera Utara antara lain adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya kualitas pengkajian dan perumusan serta pengembangan dan pemantauan ketahanan pangan, yaitu : (a) Tersedianya data dan informasi ketersediaan, cadangan dan kerawanan pangan; (b) Tersedianya data dan informasi distribusi, harga dan akses pangan; (c) Tersedianya data dan informasi konsumsi, mutu dan keamanan pangan.

2) Meningkatnya koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan dan pemantauan ketahanan pangan yaitu : (a) Tersedianya konsep rumusan kebijakan ketersediaan dan kerawanan pangan; (b) Tersedianya konsep rumusan kebijakan distribusi, harga dan akses pangan; (c)Tersedianya bahan kebijakan penganekaragaman konsumsi mutu dan keamanan pangan serta preferensi pangan masyarakat.

3) Meningkatnya ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bersumber dari produksi sendiri melalui peningkatan produksi, pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat yang mendorong terwujudnya pangan beragam yang berasal dari sumber daya lokal, perbaikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendukung Ketahanan Pangan, penerapan teknologi tepat guna dan penyediaan modal bagi masyarakat yang mendorong optimalisasi peran seluruh aspek yang terkait dengan subsistem konsumsi pangan dari hulu dan hilir sekaligus mengembangkan agribisnis yang berkerakyatan.

4) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mencapai kemandirian pangan, yaitu : (a) Mengajak masyarakat untuk mempromosikan pangan lokal sehingga ketergantungan kebutuhan pangan bagi rakyat dan impor dapat ditekan; (b) Meningkatnya motivasi masyarakat dalam menjaga pola konsumsi pangan yang dapat memperkuat Ketahanan Pangan Lokal dan Nasional; (c) Meningkatnya

partisipasi masyarakat bersama pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan.

5) Dipertahankannya ketersediaan pangan yang cukup yaitu ketersediaan energi minimal 2.400 Kkal/Kapita/Hari dan ketersediaan protein minimal 63 Gr/Kapita/Hari.

6) Berkembangnya upaya percepatan diversifikasi konsumsi pangan, dan keamanan pangan berbasis pangan lokal dan mendorong keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal.

7) Tercapainya stabilitas harga bahan pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen.

8) Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan sekurang-kurangnya sebesar 1 (satu) persen per tahun.

9) Meningkatnya peran pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah.

10) Meningkatnya pembinaan pemantapan kelembagaan ketahanan pangan, yaitu meningkatnya peran kelembagaan dan keberdayaan ketahanan pangan baik secara formal dan informal.

11) Meningkatnya kualitas pelayanan prima dalam mendukung kegiatan ketahanan pangan, yaitu : (a) Tersedianya bahan perencanaan pembangunan ketahanan pangan; (b) Tersedianya laporan dan evaluasi ketahanan pangan; (c) Meningkatnya kualitas aparat dalam pelayanan ketahanan pangan; (d) Meningkatnya efektifitas pelayanan ketahanan pangan; (e) Meningkatnya komunikasi dalam pelayanan ketahanan pangan kepada masyarakat.

12) Meningkatnya populasi ternak
13) Meningkatnya hasil dari pemanfaatan teknologi peternakan
14) Meningkatnya produksi dan daya saing komoditas hasil peternakan (daging, susu dan telur)
15) Meningkatnya nilai tukar petani peternak
16) Persentase kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terpenuhinya ketersediaan pangan	Meningkatknya daya saing di bidang ekonomi maupun sosial budaya	Ketersediaan Pangan Utama:					
			- Ketersediaan energi per kapita minimal 2400 k.kal dan penyediaan protein perkapita minimal 63 gr per hari	Energi : 3.872 k.kal Protein : 76,58 gram	Energi : 3.876 k.kal Protein : 76,98 gram	Energi : 3.880 k.kal Protein : 77,38 gram	Energi : 3.884 k.kal Protein : 77,78 gram	Energi : 3.890 k.kal Protein : 78,0 gram
			- Ketersediaan cadangan pangan (Ton)	106 ton	146 ton	186 ton	226 ton	260 ton
			- Lumbung Pangan (lumbung pangan)	29 Lumbung	29 Lumbung	29 Lumbung	29 Lumbung	29 Lumbung
			- Kelompok Lumbung Pangan (Gapoktan)	89 Gapoktan	94 Gapoktan	99 Gapoktan	104 Gapoktan	109 Gapoktan
			Distribusi akses pangan:					
			- Sistem distribusi harga (%)	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			- Akses Pangan Masyarakat (kelompok)	62 Klpk	81 Klpk	101 Klpk	121 Klpk	141 klpk
			Penganekaragaman dan keamanan pangan:					
			- Penganekaragaman konsumsi pangan dan penurunan konsumsi beras	Konsumsi beras 128,65 kg/kap/th PPH	Konsumsi beras 126,72 kg/kap/th PPH	Konsumsi beras 124,82 kg/kap/th PPH	Konsumsi beras 122,94 kg/kap/th PPH	Konsumsi beras 121,11 kg/kap/th PPH

			perkapita 1,5% untuk memenuhi target skor pola pangan harapan (PPH)	84,5	85,0	85,8	86,5	87,0
			- Konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan energi ; karbohidrat minimal 2.220 kkal dan protein 57,0 gr perkapita perhari	Karbo hidrat 2100 k.kal Protei n 62,8 gram	Karbo hidrat 2100 k.kal Protei n 62,8 gram	Karbo hidrat 2200 k.kal Protei n 62,8 gram	Karbo hidrat 2200 k.kal Protei n 63,2 gram	Karbo hidrat 2200 k.kal Protei n 63,2 gram
			- Sistem penanganan keamanan pangan segar	70 %	75%	80%	85%	90 %
			- Sertifikasi buah dan sayuran segar kelompok produsen di kab/kota	10 klpk sayura n/ buah	15 klpk sayura n/ buah	20 klpk sayura n/ buah	25 klpk sayura n/ buah	30 klpk sayura n/ buah
			Penanganan Kerawanan Pangan:					
			- Berkurangny a penduduk miskin dan rawan pangan	10,61 %	9,61 %	8,91 %	8,67 %	8,49 %
			- Terlaksanan ya penanganan daerah rawan pangan	75 desa	75 desa	75 desa	75 desa	75 desa
			Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Ketahanan Pangan:					
			- Efektivitas koordinasi kelembagaan dewan ketahanan pangan (%)	53 %	65 %	76 %	88 %	100 %

			- Pemantapan rapat koordinasi DKP provinsi dan kab./kota	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali
2.	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak	1. Meningkatnya nilai tukar petani peternak	NTP sub sektor peternakan (%)	107,32	107,51	108,30	109,09	109,88
3.	Terpenuhinya pangan asal ternak bagi masyarakat, bahan baku industri dan ekspor	2. Meningkatnya produksi dan daya saing komoditas hasil peternakan (daging, susu dan telur)	Produksi daging (Ton)	141.687,22	147.463,43	153.239,65	159.015,87	164.792,09
			Produksi telur (Ton)	139.363,38	145.262,50	151.161,63	157.060,75	162.959,87
			Produksi susu (Ton)	835,17	909,29	983,42	1.057,54	1.131,67
4.	Optimalisasi pemanfaatan teknologi peternakan	Meningkatnya hasil dari pemanfaatan teknologi peternakan	Jumlah akseptor Inseminasi Buatan (Ekor)	56.000,00	61.830,00	67.441,00	73.054,00	78.670,00
			Jumlah kelahiran Inseminasi Buatan (Ekor)	40.000,00	44.518,00	48.558,00	52.599,00	56.642,00
5.	Tersedianya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	1,97	1,81	1,82	1,80	1,79

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan di Sumatera Utara selama tahun 2013 - 2018, strategi yang dilaksanakan adalah :

1) Optimalisasi pemanfatan sumberdaya alam dengan tetap memperhatikan keberlangsungan dan pelestarian lingkungan
2) Penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan serta mendorong terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan kondusif bagi ketahanan pangan.
3) Peningkatan dan pengembangan kelembagaan pangan masyarakat/kelompok tani/masyarakat mendukung ketersediaan pangan dan kemandirian pangan.
4) Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam rangka keberlanjutan Program Aksi Gema Pangan, peningkatan akses pangan masyarakat untuk mengentaskan dan mitigasi masyarakat miskin rawan pangan.
5) Kerjasama instansi lintas sektoral/SKPD Provinsi dengan pemangku kepentingan /stakeholder tentang sinergi dan dukungan program ketahanan pangan mewujudkan peningkatan produksi dan daya saing.
6) Mendorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBD, APBN dan dana masyarakat

Pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat melalui : Peningkatan ketersediaan, penanganan kerawanan pangan; peningkatan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan dan akses pangan; Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan pengembangan diversifikasi pangan, mutu dan keamanan pangan ; Peningkatan efektivitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

Dengan memperhatikan faktor – faktor kunci keberhasilan yang ada guna terwujudnya tujuan dan sasaran Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Utara, maka ditetapkan kebijakan yang akan dijadikan pedoman di dalam melaksanakan kegiatan operasional peningkatan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi, keamanan dan kewaspadaan pangan.

1. Kebijakan dalam Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

a. Optimalisasi pemanfaatan lahan irigasi yang ada serta perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi baru dan penghentian alih fungsi lahan melalui penetapan aturan-aturan yang dilandasi hukum dalam bentuk Perda dan Perdes.

b. Pengembangan konservasi dan rehabilitasi lahan agar potensi lahan yang ada dapat dipertahankan terutama di wilayah usaha berbasis pertanian, peternakan, perkebunan perikanan dan kehutanan dengan menerapkan teknologi konservasi dan rehabilitasi.

c. Penyediaan sarana produksi dan permodalan secara 6(enam) tepat, sehingga dapat bermanfaat untuk petani bagi meningkatkan produktivitas hasil.

d. Peningkatan keberdayaan masyarakat miskin yang berada dalam kondisi kerawanan pangan kronis serta pengembangan jaringan pengaman pangan bagi kelompok rawan pangan transien karena bencana alam dan sosial.

e. Pengefektifkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) serta mitigasi daerah rawan pangan

f. Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menghadapi masalah pangan.

2. Kebijakan dalam Aspek Distribusi dan Akses Pangan

a. Peningkatan efisiensi dan kelancaran distribusi bahan pangan melalui reformasi berbagai peraturan yang menghambat lalulintas perdagangan, pengembangan sarana dan prasarana distribusi serta pelayanan tekhnologi pasca panen.

b. Peningkatan kemampuan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menstabilkan harga bahan pangan antar waktu maupun antar wilayah.

c. Penguatan pangsa pasar yang bukan saja antar propinsi tetapi juga eksport serta mengembangkan kemitraan untuk menjamin pemasaran hasil.

d. Menjaga stabilitasi harga pangan di tingkat produsen dan konsumen terutama pada hari-hari besar keagamaan nasional dan panen raya.

3. Kebijakan dalam Aspek Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan

a. Mendorong diversifikasi pola konsumsi pangan masyarakat berbasis pangan lokal agar hidup sehat dan produktif serta mendorong penurunan konsumsi beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat.

b. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang makanan melalui peningkatan penganekaragaman konsumsi bahan pangan yang beragam, bergizi dan berimbang dan aman sejak usia dini.

c. Mendorong diversifikasi pola konsumsi pangan melalui peningkatan konsumsi bahan pangan lokal yang berbasis pada non beras.

d. Meningkatkan pembinaan keamanan pangan segar di tingkat petani dan konsumen.

e. Meningkatkan kemampuan kelembagaan dan aparat daerah dalam penanganan keamanan pangan segar.

Kebijakan Pembangunan Peternakan

Strategi - 1: Peningkatan populasi dan optimalisasi produksi ternak dengan pemanfaatan teknologi, Peningkatan ketersediaan dan perbaikan mutu benih dan bibit ternak, Peningkatan ketersediaan dan perbaikan mutu benih dan bibit ternak, Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan gangguan reproduksi.

Arah Kebijakan – Kebijakan umum diarahkan kepada a) Meningkatkan populasi dan

produktifitas ternak; b) Menjamin ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak; c) Meningkatkan produksi pakan ternak; d) Meningkatkan status kesehatan hewan.

Strategi- 2 : Pendayagunaan peran dan fungsi kelembagaan serta SDM peternakan, Meningkatkan daya saing produk peternakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya local, Optimalisasi IB, Pencegahan dan pengamanan bahaya pencemaran produk hewan, zoonosis dan produk rekayasa genetik, serta peningkatan penerapan kesejahteraan hewan.

Arah Kebijakan. Kebijakan umum diarahkan kepada a) Menjamin ketersediaan sarana dan parasarana IB; b) Menjamin produk hewan yang ASUH dan berdaya saing; c) Meningkatkan kemampuan SDM peternakan.

Strategi-3. Memperlancar arus produk peternakan melalui peningkatan efisiensi distribusi.

Arah Kebijakan. Kebijakan umum diarahkan kepada Memfasilitasi sarana dan prasarana peternak baik hulu maupun hilir.
Strategi-4. Pemanfaatan peluang investasi untuk pengembangan komoditas unggulan peternakan, Meningkatkan promosi produk peternakan untuk ekspor, Memfasilitasi lembaga keuangan dengan peternak dalam usaha peningkatan usaha.

Arah Kebijakan. Kebijakan umum diarahkan kepada Memfasiitasi lembaga keuangan pemerintah dan swasta dengan kelompok-kelompok agribsnis peternakan.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tabel. Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 *)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								2014		2015		2016		2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)	
					Tolok Ukur	Sasaran		Target	Juta (Rp.)	Target	Juta (Rp.)	Target	Juta (Rp.)	Target	Juta (Rp.)	Target	Juta (Rp.)	Target	Juta (Rp.)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	**03**	**01**		**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA**															
				Perda No. 5 Tahun 2014					40.171		79.744		77.292		96.775		148.340		442.321
				Perubahan					72.894		46.335		66.811		100.365		200.641		487.046
2	03	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
				Perda No, 5 Tahun 2014	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	%	100%	100,00%	4.444,00	100,00%	8.791,00	100,00%	8.298,00	100,00%	10.491,00	100,00%	16.065,00	100,00%	48.089,00
				Perubahan		%	100%	100,00%	37.905,51	100,00%	2.919,00	100,00%	3.433,00	100,00%	3.614,40	100,00%	3.194,50	100,00%	51.066,41
2	03	01	01	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur															
				Perda No, 5 Tahun 2014	Rasio luas kantor/jumlah aparatur	%	70%	75,00%	4.361,00	76,00%	8.435,00	77,00%	7.943,00	78,00%	10.014,00	80,00%	15.376,00	80,00%	46.129,00
				Perubahan		%	70%	75,00%	2.953,70	76,00%	2.882,00	77,00%	9.089,00	78,00%	5.305,80	80,00%	13.395,80	80,00%	33.626,30
2	03	01	01	Program Peningkatan disiplin aparatur															
				Perda No, 5 Tahun 2014	Persentase tingkat kehadiran pegawai	%	90%	95,00%	462,00	96,00%	830,00	97,00%	810,00	98,00%	1.000,00	99,00%	1.524,00	99,00%	4.626,00
				Perubahan		%	90%	95,00%	387,00	96,00%	384,00	97,00%	240,00	98,00%	600,00	99,00%	820,00	99,00%	2.431,00
2	03	01	01	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur															
				Perda No, 5 Tahun 2014	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	%	90%	92,00%	512,00	94,00%	1.194,00	95,00%	1.104,00	98,00%	1.414,00	99,00%	2.136,00	100,00%	6.360,00
				Perubahan		%	90%	92,00%	256,15	94,00%	578,00	95,00%	634,00	98,00%	643,00	99,00%	815,80	100,00%	2.926,95
2	03	01	01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															
				Perda No, 5 Tahun 2014	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	%	85%	90,00%	1.510,00	95,00%	4.776,00	97,00%	4.544,00	98,00%	5.779,00	98,00%	8.903,00	98,00%	25.512,00
				Perubahan		%	85%	90,00%	1.509,81	95,00%	1.592,00	97,00%	2.470,00	98,00%	1.898,00	98,00%	4.830,00	98,00%	12.299,81

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 *)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								2014		2015		2016		2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)	
					Tolok Ukur	Sasaran		Target	Juta (Rp.)	Target	Juta (Rp.)	Target	Juta (Rp.)	Target	Juta (Rp.)	Target	Juta (Rp.)	Target	Juta (Rp.)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	03	01	01	Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan															
				Perda No, 5 Tahun 2014	Ketersediaan Pangan				11.864,80		19.398,96		20.768,52		23.971,03		36.138,72		112.142,04
					Cadangan Pangan	Ton	66 ton	106 ton		146 ton		186 ton		226 ton		260 ton		160 ton	-
					Lumbung Pangan	Unit	282 lumbung	311 lumbung	-	340 lumbung	-	369 lumbung	-	398 lumbung	-	427 lumbung	-	178 lumbung	-
					Kelompok L. Pangan	Gapoktan	84 gapoktan	89 gapoktan	-	94 gapoktan	-	99 gapoktan	-	104 gapoktan	-	109 gapoktan	-	109 gapoktan	-
					Penduduk Rawan Pangan	%	10,4%	9,4%	-	8,4%	-	8,0%	-	7,0%	-	6,0%	-	5,0%	-
				Perubahan	Ketersediaan Pangan				12.864,80		20.737,48		28.230,05		35.617,38		37.309,21		134.758,91
					Cadangan Pangan	Ton	66 ton	106 ton		146 ton		186 ton		226 ton		260 ton		160 ton	-
					Lumbung Pangan	Unit	282 lumbung	311 lumbung		340 lumbung	-	369 lumbung	-	398 lumbung	-	427 lumbung	-	178 lumbung	-
					Kelompok L. Pangan	Gapoktan	84 gapoktan	89 gapoktan	-	94 gapoktan	-	99 gapoktan	-	104 gapoktan	-	109 gapoktan	-	109 gapoktan	-
					Penduduk Rawan Pangan	%	10,4%	9,4%	-	8,4%	-	8,0%	-	7,0%	-	6,0%	-	5,0%	-
2	03	01	01	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani															
				Perda No, 5 Tahun 2014	Nilai tukar petani peternak	indeks	105,14	107,32	326,00	107,51	695,00	108,30	657,00	109,09	860,00	109,88	1.334,00	109,88	3.872,00
				Perubahan	Nilai tukar petani peternak	indeks	105,14	107,32	325,60	107,51	500,00	108,30	-	109,09	622,55	109,88	2.400,00	109,88	3.848,15
2	03	01	01	Program peningkatan Produksi Hasil Peternakan															
				Perda No, 5 Tahun 2014	Produksi komoditi hasil ternak per tahun				10.192,00		21.752,00		20.225,00		26.292,00		40.754,00		119.215,00
					- Daging	Ton	135.911,00	141.687,22		147.463,43		153.239,65		159.015,87		164.792,09		164.792,09	
					- Telur	Ton	133.464,26	139.363,38		145.262,50		151.161,63		157.060,75		162.959,87		162.959,87	
					- Susu	Ton	761,04	835,17		909,29		983,42		1.057,54		1.131,67		1.131,67	
				Perubahan	Produksi komoditi hasil ternak per tahun				10.191,55		12.182,95		16.522,84		46.998,01		117.500,40		203.395,75
					- Daging	Ton	135.911,00	141.687,22		147.463,43		153.239,65		159.015,87		164.792,09		164.792,09	
					- Telur	Ton	133.464,26	139.363,38		145.262,50		151.161,63		176.963,31		185.811,48		185.811,48	
					- Susu	Ton	761,04	835,17		909,29		983,42		898,91		961,92		961,92	

Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD Tahun 2013 *)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								2014		2015		2016		2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)	
					Tolok Ukur	Sasaran		Target	Juta (Rp.)	Target	Juta (Rp.)	Target	Juta (Rp.)	Target	Juta (Rp.)	Target	Juta (Rp.)	Target	Juta (Rp.)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	03	01	01	Program peningkatan pemanfaatan teknologi															
				Perda No, 5 Tahun 2014	Pemanfaatan teknologi IB				2.489,00		5.313,00		4.984,00		6.529,00		10.055,00		29.370,00
					- Jumlah akseptor IB	ekor	56.758,00	56.000,00		61.830,00		67.441,00		73.054,00		78.670,00		78.670,00	
					- Jumlah kelahiran IB	ekor	37.388,00	40.000,00		44.518,00		48.558,00		52.599,00		56.642,00		56.642,00	
				Perubahan	Pemanfaatan teknologi IB				2.489,42		1.978,83		2.000,00		2.854,83		7.025,00		16.348,08
					- Jumlah akseptor IB	ekor	56.758,00	56.000,00		61.830,00		67.441,00		125.900,00		125.900,00		125.900,00	
					- Jumlah kelahiran IB	ekor	37.388,00	40.000,00		44.518,00		48.558,00		50.612,00		50.612,00		50.612,00	
2	03	01	01	Program pengembangan agribisnis															
				Perda No, 5 Tahun 2014	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB				4.010,00		8.559,00		7.958,00		10.425,00		16.054,00		47.006,00
					- PDRB ADHB	%	1,98	1,97		1,81		1,82		1,80		1,79		1,79	
				Perubahan	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB				4.010,09		2.581,01		4.192,50		2.211,39		13.350,00		26.344,99
					- PDRB ADHB	%	1,98	1,97		1,81		1,82		1,80		1,79		1,79	

BAB VII
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tabel. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2013)	2014		2015		2016		2017	2018	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2018)	KET. PERUBAHAN
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.12.	**Ketahanan Pangan dan Peternakan**											
	1. Ketersediaan energi perkapita minimal 2400 k.kal dan penyediaan protein perkapita minimal 63gr per hari	karbohidrat :3.868,41 k.kal Protein : 76,18 gr	karbohidrat :3.886 k.kal Protein : 76,58 gr	karbohidrat :3.886 k.kal Protein : 76,58 gr	karbohidrat :3.876 k.kal Protein : 76,98 gr	karbohidrat :3.876 k.kal Protein : 76,98 gr	karbohidrat :3.880 k.kal Protein : 77,38 gr	karbohidrat :3.880 k.kal Protein : 77,38 gr	karbohidrat : 3.884 k.kal/protein : 77,78 gr	karbohidrat : 3.890 k.kal/protein : 78,0 gr	karbohidrat :3.890 k.kal Protein : 78,0 gr	
	2. Ketersediaan cadangan pangan	66 ton	106 ton	106 ton	146 ton	146 ton	186 ton	186 ton	226 ton	260 ton	260 ton	
	3. Lumbung pangan masyarakat	282 lumbung pangan	311 lumbung pangan	311 lumbung pangan	340 lumbung pangan	340 lumbung pangan	369 lumbung pangan	369 lumbung pangan	398 lumbung pangan	427lumbung pangan	427lumbung pangan	
	4. Kelompok Lumbung Pangan (Gapoktan)	84 gapoktan	89 gapoktan	89 gapoktan	94 gapoktan	94 gapoktan	99 gapoktan	99 gapoktan	104 gapoktan	109 gapoktan	109 gapoktan	
5.12.2	Distribusi Akses Pangan :											
	1. Sistem distribusi harga	75%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2. Akses pangan masyarakat (Kelompok)	43 kelompok	62 kelompok	62 kelompok	81 kelompok	81 kelompok	101 kelompok	101 kelompok	121 kelompok	141 kelompok	141 kelompok	
5.12.3	Penganekaragaman dan keamanan pangan											
	1. penganekaragaman konsumsi pangan dan penurunan konsumsi beras perkapita 1,5% untuk memenuhi target skor pola pangan harapan (PPH)	Konsumsi beras 130,61 kg/kap/th/ PPH 83,6	Konsumsi beras 128,65 kg/kap/th/ PPH 84,5	Konsumsi beras 128,65 kg/kap/th/ PPH 84,5	Konsumsi beras 126,72 kg/kap/th/ PPH 85	Konsumsi beras 126,72 kg/kap/th/ PPH 85	Konsumsi beras 124,82 kg/kap/th/ PPH 85,8	Konsumsi beras 124,82 kg/kap/th/ PPH 85,8	Konsumsi beras 122,94 kg/kap/th/ PPH 86,5	Konsumsi beras 121,11 kg/kap/th/ PPH 87	Konsumsi beras 121,11 kg/kap/th/ PPH 87	
	2. konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan energi ; karbohidrat minimal 2.220 kkal dan protein 57,0 gr perkapita perhari	karbohidrat :1997,2 k.kal Protein : 57,6 gr	karbohidrat : 2100 k.kal Protein : 57,6gr	karbohidrat : 2100 k.kal Protein : 57,6gr	karbohidrat : 2100 k.kal Protein : 57,6gr	karbohidrat : 2100 k.kal Protein : 57,6gr	karbohidrat : 2200 k.kal Protein : 58,0gr	karbohidrat : 2200 k.kal Protein : 58,0gr	karbohidrat : 2200 k.kal Protein : 58,5gr	karbohidrat : 1997,2 k.kal Protein : 58,5 gr	karbohidrat : 1997,2 k.kal Protein : 58,5 gr	
	3. Sistem penanganan keamanan pangan segar	65%	70%	70%	75%	75%	80%	80%	85%	90%	90%	
	4. Sertifikasi buah dan sayuran segar kelompok produsen di kab/kota	6 kelompok sayuran/buah	10 kelompok sayuran/buah	10 kelompok sayuran/buah	15 kelompok sayuran/buah	15 kelompok sayuran/buah	20 kelompok sayuran/buah	20 kelompok sayuran/buah	25 kelompok sayuran/buah	30 kelompok sayuran/buah	100 kelompok sayuran/buah	
5.12.4	Penanganan Kerawanan Pangan											
	1. Berkurangnya penduduk miskin dan rawan pangan	10,67%	10,61%	10,61%	9,61%	9,61%	8,91%	8,91%	8,67%	8,49%	8,49%	
	2. Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan	300 desa	75 desa	75 desa	75 desa	75 desa	75 desa	75 desa	75 desa	75 desa	375 desa	
5.12.5	Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Ketahanan Pangan											
	Efektivitas koordinasi kelembagaan dewan ketahanan pangan	42%	53%	53%	65%	65%	76%	76%	88%	100%	100%	
5.12.6	Nilai tukar petani peternak (%)	105,14	107,32	107,32	107,51	107,51	108,30	108,30	109,09	109,88	109,88	

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2013)	2014		2015		2016		2017	2018	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2018)	KET. PERUBAHAN
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.12.7	Produksi komoditi hasil ternak per tahun											
	- Daging (ton/thn)	135.911,00	141.687,22	141.687,22	147.463,43	147.463,43	153.239,65	153.239,65	159.015,87	164.792,09	164.792,09	
	- Telur (ton/thn)	133.464,26	139.363,38	139.363,38	145.262,50	145.262,50	151.161,63	151.161,63	157.060,75	162.959,87	162.959,87	
	- Susu (ton/thn)	761,04	835,17	835,17	909,29	909,29	983,42	983,42	1.057,54	1.131,67	1.131,67	
5.12.8	Pemanfaatan teknologi IB											
	- Jumlah akseptor IB (ekor)	56.758	56.000	56.000	61.830	61.830	67.441	67.441	125.900	125.900	125.900	
5.12.9	- Jumlah kelahiran IB (ekor)	37.388	40.000	40.000	44.518	44.518	48.558	48.558	68.000	68.000	68.000	
	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB											
	- PDRB ADHB (%)	1,98	1,97	1,97	1,81	1,81	1,82	1,82	1,80	1,79	1,79	

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 ini pada dasarnya menjabarkan perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan kemana pembangunan ketahanan pangan dan peternakan Sumatera Utara akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang (2014-2018); bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Periodesasi Renstra ini disesuaikan masa jabatan kepala daerah terpilih, yakni 2013-2018.

Perubahan Renstra Tahun 2013-2018 ini disusun dengan latar belakang antara lain :

1. Penyusunan dan penetapan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 lebih dulu dari RPJMN Tahun 2015 – 2019;
2. Penyesuaian terhadap urusan pemerintahan dan kewenangan berdasarkan Udang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Perubahan SOTK dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
4. Tindaklanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah
5. Tindaklanjut Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/Sj dan No. 0430/M.PPN/12/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2015-2019
6. Sebagai tindaklanjut Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor LS-74/PW02/3/2016 Perihal Laporan Mengikuti Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Provinsi Sumatera Utara

Perubahan Renstra Tahun 2013-2018 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi RPJMD dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005–2025, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 serta hasil Evaliasi Mid Term Review RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dan mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya Perubahan Renstra Tahun 2013-2018 ini akan dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan, yakni Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun.